



**PERJANJIAN CAMP DAVID DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
HUBUNGAN MESIR DENGAN NEGARA-NEGARA ARAB PADA MASA  
PEMERINTAHAN ANWAR SADAT TAHUN 1970-1981**

**SKRIPSI**

**Oleh**  
Misbahul Ulum  
NIM 120210302002

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**



**PERJANJIAN CAMP DAVID DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
HUBUNGAN MESIR DENGAN NEGARA-NEGARA ARAB PADA MASA  
PEMERINTAHAN ANWAR SADAT TAHUN 1970-1981  
HALAMAN AWAL**

**SKRIPSI**

diajukan sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat untuk  
menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Program Studi  
Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
FKIP Universitas Jember

**Oleh**  
Misbahul Ulum  
NIM 120210302002

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Supyati dan Bapak Hamzah, serta Ibu Mertua Tumainah, S. Pd., dan adik Dhani Kurniawan H., serta Istriku Maulida Muakrromah, S. Pd., yang telah memberikan kasih sayang tulus dan doa di setiap langkahku, memberikan bimbingan, perlindungan dan semangat dalam menjalani hidup demi keberhasilanku.
2. Guru-guruku mulai SD sampai perguruan tinggi, terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan kepadaku.
3. Almamater tercinta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang kubanggakan.

**MOTTO**

“He has Lived for Peace, but He Died for his Principles”

(Anwar Sadat –Politician and President of Egypt-)\*



\*) <https://www.jagokata.com/quotes/896463-anwar-sadat>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misbahul Ulum

NIM : 120210302002

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “Perjanjian Camp David dan Dampaknya terhadap Hubungan Mesir dengan Negara-Negara Arab pada masa Pemerintahan Anwar sadat Tahun 1978-1981” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 April 2019

Yang menyatakan,

Misbahul Ulum.

NIM. 120210302002

**SKRIPSI**

**PERJANJIAN CAMP DAVID DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
HUBUNGAN MESIR DENGAN NEGARA-NEGARA ARAB PADA MASA  
PEMERINTAHAN ANWAR SADAT TAHUN 1970-1981**

Oleh:

Misbahul Ulum  
NIM. 120210302002

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Sugiyanto, M. Hum.

Dosen Pembimbing II : Drs. Sumarjono, M. Si.

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Perjanjian Camp David dan Dampaknya terhadap Hubungan Mesir dengan Negara-Negara Arab pada masa Pemerintahan Anwar Sadat Tahun 1970-1981” ini telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada :

hari, tanggal : Jum’at, 12 April 2019

tempat : Gedung 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Sugiyanto, M. Hum.  
NIP. 19570220 198503 1 003

Drs. Sumarjono, M. Si.  
NIP. 19580823 198702 1 001

Anggota I,

Anggota II

Drs. Marjono, M. Hum.  
NIP. 19600422 198802 1 001

Dr. Nurul Umamah, M. Pd.  
NIP. 19690204 199303 2 008

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D  
NIP. 196808021993031004

## RINGKASAN

**Perjanjian Camp David dan Dampaknya terhadap Hubungan Mesir dengan Negara-Negara Arab pada masa Pemerintahan Anwar Sadat tahun 1978-1981**, Misbahul Ulum, 120210302002; 2019, xi + 67; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Perjanjian Camp David merupakan perjanjian perdamaian antara Mesir dengan Israel. Perjanjian Camp David terjadi pada tanggal 17 September 1978 dengan bantuan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut dinamai Camp David dikarenakan tempat pelaksanaan perundingan perjanjian Mesir dengan Israel yang berada ditempat peristirahatan milik para presiden Amerika Serikat bernama Camp David yang terletak di Frederick County, Meryland. Penandatanganan perjanjian Camp David dilakukan Anwar Sadat dengan tujuan untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Mesir. Faktor utama terjadinya krisis ekonomi di Mesir dikarenakan ikut sertanya Mesir dalam beberapa perang dengan Israel. Perjanjian damai dengan Israel dipilih oleh Anwar Sadat untuk mendapatkan kembali semenanjung Sinai yang telah dikuasai oleh Israel pasca perang 6 hari (1967). Anwar Sadat berasumsi bahwa dengan kembalinya semenanjung Sinai dapat mengangkat perekonomian Mesir

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Apa yang melatarbelakangi munculnya perjanjian Camp David ?; (2) Bagaimanakah Dampak perjanjian Camp David terhadap hubungan Mesir dengan negara-negara Arab?. Tujuan dari penelitian ini adalah; (1) Untuk mendeskripsikan secara logis mengenai latarbelakang munculnya perjanjian Camp David.; (2) Untuk mendeskripsikan dampak perjanjian Camp David tahun 1978 terhadap hubungan Mesir dengan negara-negara Arab

Manfaat dari penelitian ini adalah; (1) bagi peneliti, sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah, serta memperdalam pengetahuan kita tentang kondisi politik di Timur Tengah khususnya Mesir pasca perjanjian Camp David, (2) bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat menambah pengetahuan dan

penguasaan materi Sejarah Asia Barat Daya, khususnya negara Mesir, (3) bagi almamater merupakan pelaksanaan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Dharma penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah Asia Barat. Subyek dalam penelitian ini adalah Dampak Perjanjian Camp David tahun 1978 bagi Mesir dengan negara-negara Arab sekitar.

Hasil penelitian ini adalah sikap politik Anwar Sadat untuk mengalah dan memberikan ruang gerak bebas bagi Israel untuk melakukan eksploitasi dan menguasai beberapa pemukiman penduduk Palestina. Perjanjian damai antara Mesir dan Israel ini dilakukan karena Mesir mengalami kekalahan telak dalam perang 6 hari antara pasukan Israel dengan pasukan gabungan timur tengah. Dampak dari perjanjian Camp David bagi Mesir sendiri adalah adanya pergolakan dalam internal negara yang mengakibatkan ketidakpercayaannya penduduk mesir terhadap kepemimpinan Anwar Sadat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat muslim Palestina yang dimulai dengan adanya gejolak protes dan pemberontakan kelompok Ikhwanul Muslimin.

Kesimpulan dari penelitian ini meliputi hal-hal yang melatarbelakangi Anwar Sadat melakukan perjanjian damai dengan Israel dalam perjanjian Camp David adalah kalahnya Mesir dan pasukan gabungan Jazirah Arab dalam perang 6 hari melawan israel, alasan lainnya karena demi menjaga stabilitas politik dalam dan luar negeri Mesir pasca kekalahan dalam perang 6 hari. Sedangkan dampak perjanjian Camp David bagi Mesir sendiri adalah munculnya gelombang protes dari kalangan mahasiswa dan kalangan terpelajar dengan menunjukkan sikap ketidakpercayaannya terhadap kepemimpinan dan pemerintahan Anwar Sadat, serta munculnya gejolak pemberontakan dalam negeri yang berusaha menggulingkan pemerintahan Anwar Sadat yang dilakukan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin dengan dalih pemerintahan Anwar Sadat tidak pro-Palestina dan lebih mengakui Israel sebagai negara berdaulat di atas tanah Palestina.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah swt. Atas segala rahmat, dan karunia-nya sehingga penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul “Perjanjian Camp Daviddan Dampaknya terhadap Hubungan Mesir dengan Negara-Negara Arab pada masa Pemerintahan Anwar Sadat tahun 1978-1981”.

Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph.D, selaku Rektor Universitas Jember
2. Prof. Dr. Dafik, M.Sc. Ph. D, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas jember;
3. Dr. Sumardi, M. Hum, selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jember;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd, selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember, sekaligus Penguji Anggota;
5. Drs. Sugiyanto, M. Hum., selaku sebagai dosen pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan saran dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;
6. Drs. Sumarjono, M. Si., selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;
7. Drs. Marjono, M. Hum., selaku dosen penguji anggota yang telah banyak memberikan masukan dalam skripsi ini;
8. Dosen-dosen pendidikan sejarah yang telah membimbing penulis dari awal sampai saat ini;
9. Orang tua tercinta, Ibu Supyati dan Bapak Hamzah. Serta Ibu Maertua Tumainah, S. Pd., dan Adik Dhani Kurniawan H., yang tiada henti-hentinya

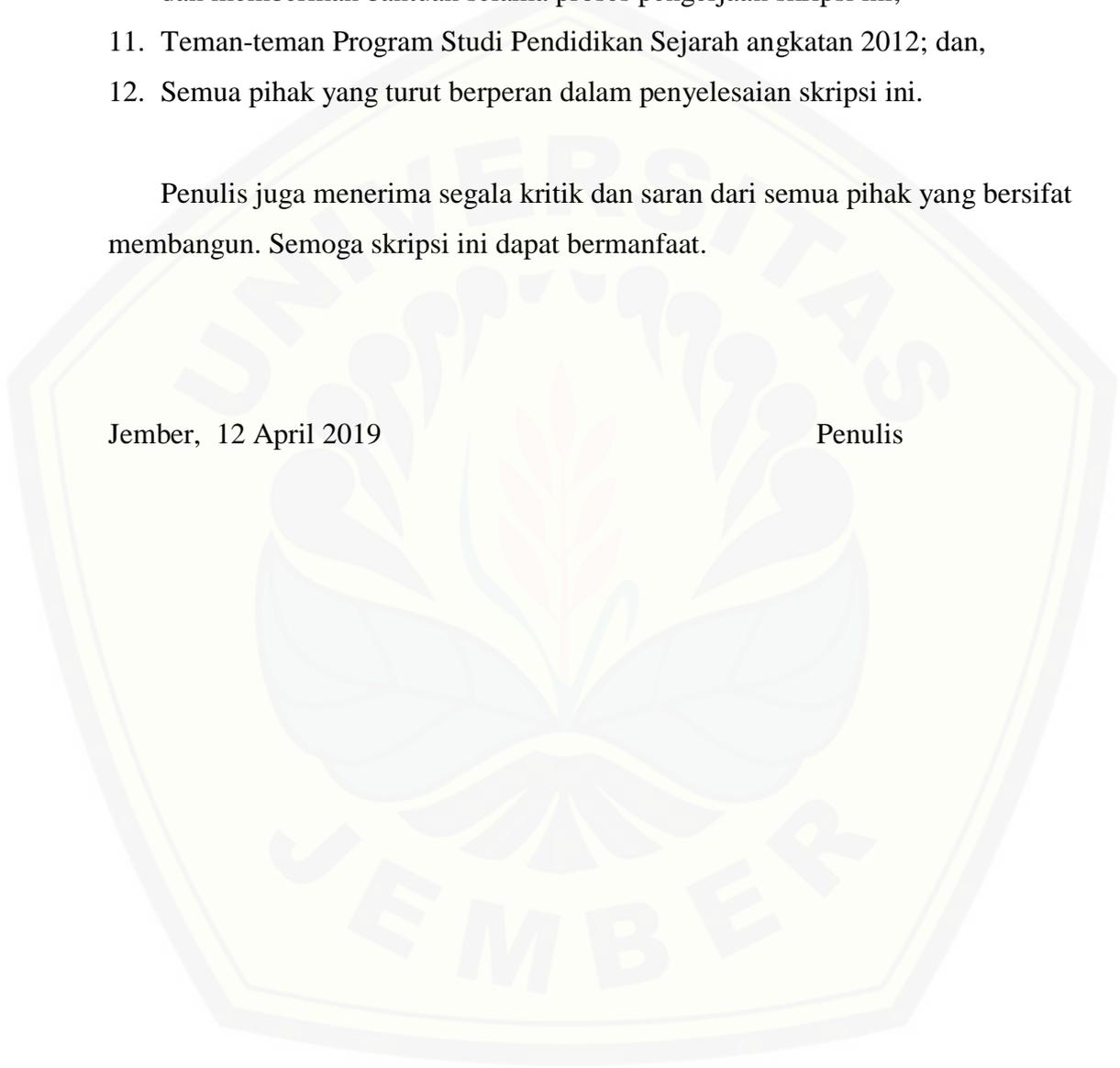
memberikan do'a, semangat, motivasi, dan nasehat yang selalu mengiringi setiap langkah penulis;

10. Sahabat-sahabat terbaikku Fazl Ahmad Habib, Dika Maulana Rahman, Mahatma Radea Kresno, yang telah meluangkan waktunya untuk menemani dan memberikan bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini;
11. Teman-teman Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 2012; dan,
12. Semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 12 April 2019

Penulis



**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penegasan Judul .....	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.4 Rumusan Masalah .....	5
1.5 Tujuan Penelitian .....	6
1.6 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB 4. PERJANJIAN CAMP DAVID .....</b>	<b>19</b>
4.1 Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Camp David .....	19
4.1.1 Kondisi Politik dalam Negeri Mesir .....	19
4.1.2 Kondisi Politik Luar Negeri Mesir .....	19
4.1.3 Latar Belakang Anwar Sadat Berdamai dengan Israel .....	21
4.1.4 Kunjungan Anwar Sadat ke Israel .....	22
4.2 Perjanjian Camp David .....	24
4.2.1 Isi Perjanjian Campd David .....	31
4.2.2 Arti Penting Perjanjian Camp David .....	33

4.2.3 Kekurangan dan Kelebihan Perjanjian Camp David .....	36
4.3 Proses Perjanjian Camp David .....	38
4.3.1 Perundingan Pendahuluan .....	39
4.3.2 Proses Perundingan .....	42
4.3.3 Hasil Perjanjian .....	45
<b>BAB 5. DAMPAK PERJANJIAN CAMP DAVID .....</b>	<b>48</b>
5.1 Dampak Bagi Israel .....	49
5.2 Dampak Bagi Mesir .....	52
5.3 Dampak Hubungan Mesir dengan Negara-Negara Arab .....	53
5.3.1 Mesir dengan Arab Saudi .....	57
5.3.2 Mesir dengan Libya .....	60
5.3.3 Mesir dengan Suriah .....	64
<b>BAB 6. PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
6.1 Simpulan .....	69
6.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian Camp David merupakan perjanjian perdamaian antara Mesir dengan Israel. Perjanjian Camp David terjadi pada tanggal 17 September 1978 dengan bantuan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut dinamai Camp David dikarenakan tempat pelaksanaan perundingan perjanjian Mesir dengan Israel yang berada di tempat peristirahatan milik para presiden Amerika Serikat bernama Camp David yang terletak di Frederick County, Meryland. Penandatanganan perjanjian Camp David dilakukan Anwar Sadat dengan tujuan untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Mesir. Faktor utama terjadinya krisis ekonomi di Mesir dikarenakan ikut sertanya Mesir dalam beberapa perang dengan Israel. Perjanjian damai dengan Israel dipilih oleh Anwar Sadat untuk mendapatkan kembali semenanjung Sinai yang telah dikuasai oleh Israel pasca perang 6 hari (1967). Anwar Sadat berasumsi bahwa dengan kembalinya semenanjung Sinai dapat mengangkat perekonomian Mesir (Findley, 1995:46). Rencana perjanjian ini dimulai dengan melakukan kunjungan kerja ke pihak Israel.

Pada November 1977 Anwar Sadat berencana untuk melakukan kunjungan ke yerusalem (Israel) untuk merintis usaha perdamaian melalui perundingan langsung dengan Israel. Sejak awal rencana Anwar Sadat untuk berkunjung ke yerusalem dalam perihal pembahasan mengenai perjanjian perdamaian antara Mesir-Israel telah mendapat banyak tentangan dari berbagai pihak baik dari Negarawan, Politikus dan mahasiswa. Negara-negara anggota liga Arab juga tidak ketinggalan mengemukakan sikap keberpihakan, ada negara yang tidak menentang dan yang menentang dilakukannya kunjungan kenegaraan tersebut. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu negara-negara Arab masih berpegang pada semboyan “*no recognition, no negotiation, no piace*” terhadap Israel, maka tindakan Anwar Sadat dengan berkunjung ke Yerusalem dapat diartikan bahwa sikap *no recognitoon* dan *no negotiation* sudah tidak berlaku lagi bagi Mesir, tinggal mengakhiri sikap *no piace* saat dilakukanya perjanjian damai dengan Israel (Haekal, 1995:37).

Setelah terlaksananya perjanjian Camp David pada tanggal 17 September 1978 kondisi sosial dan ekonomi Mesir tidak kunjung membaik. Kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh Anwar Sadat membuat kelompok-kelompok radikal mulai bermunculan, hal ini membuat kondisi dalam negeri Mesir semakin memburuk. Bermunculannya kelompok-kelompok radikal yang sering mengkritik pemerintahan Mesir memaksa Anwar Sadat untuk menempuh garis keras dengan jalan penangkapan besar-besaran terhadap gerakan yang menentang pemerintahan (Haekal, 1995:42). Termasuk organisasi Ikhwanul Muslimin.

Kelompok Ikhwanul muslimin yang pada awalnya mendukung kepemimpinan Anwar Sadat mulai berani memberikan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Anwar Sadat. Organisasi-organisasi mahasiswa yang dipayungi oleh organisasi militan ikhwanul Muslimin dan Jamaah Islamiah mulai mengecam Anwar Sadat atas kunjungannya ke Israel, serta kesediaanya menandatangani perjanjian Camp David. Kebijakan dibidang ekonomi yaitu kebijakan *Infitah* (pintu terbuka) juga banyak menuai kritikan karena di anggap sebagai ketergantungan ekonomi Mesir yang semakin besar kepada negara-negara barat dan mendorong penetrasi budaya barat dari pakaian, perilaku hingga televisi, yang menguntungkan kaum elit yang menikmati hak istimewa dalam ekonomi, dengan demikian mendorong tumbuhnya suatu masyarakat yang di dalamnya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin (Husein, 1995:72). Proses pengambilan kebijakan yang dianggap kontroversial ini memberikan nilai positif bagi Anwar Sadat.

Keberanian Anwar Sadat mengambil keputusan untuk berdamai dengan Israel membuat Anwar Sadat mendapatkan penghargaan nobel perdamaian. Bagi dunia barat sosok Anwar Sadat dikenal sebagai tokoh yang mempunyai pemikiran terbuka dan berprinsip. Selepas pelaksanaan perjanjian damai Camp David, nama Anwar Sadat selalu dipuji dan menjadi pembicaraan hangat di media masa Amerika Serikat. Namun kondisi tersebut bertolak belakang dengan di Timur Tengah Anwar Sadat yang pada awal kepemimpinannya sangat dicintai oleh rakyatnya kini menjadi tokoh yang sangat dibenci (Sihbudi, 1993:67). Kebencian

rakyat Mesir karena menganggap Anwar Sadat telah mengkhianati perjuangan kemerdekaan Palestina dengan mengakui Israel sebagai suatu negara yang sah. Sehingga menimbulkan pergolakan dan perlawanan yang memberikan efek domino ke negara arab lainnya.

Dampak perjanjian Camp David juga dirasakan oleh dunia Arab, selepas perjanjian Camp David beberapa negara Arab yang mengalami masalah perekonomian sama seperti Mesir mulai bersikap netral terhadap Israel dan Amerika Serikat. Hal tersebut juga berdampak pada kesatuan sikap para anggota Liga Arab dalam hal penyelesaian masalah Palestina. Munculnya pemahaman bahwa berkonfrontasi dengan Israel untuk menyelesaikan masalah Palestina malah membuat kondisi dalam negeri sendiri hancur, maka hal itu menjadi pilihan rasional bagi beberapa negara Arab seperti Lebanon dan suriah untuk bersikap netral terhadap Israel (Findley, 1995:75). Sikap netralitas dan melunaknya negara arab memberikan celah bagi Israel untuk bersikap leluasan dan memperlebar wilayah kekuasaannya di tanah Palestina.

Terpecahnya dunia Arab membuat Israel semakin leluasa menerapkan politiknya di wilayah palestina. Hal tersebut juga berdampak pada penyelesaian masalah palestina yang semakin sulit untuk terselesaikan. Sebenarnya Israel menerima perjanjian damai dengan Mesir pada 1979 hanya setelah Mesir dan Amerika Serikat secara mendasar setuju untuk mengabaikan bangsa Palestina. Disisi lain, Amerika Serikat menjanjikan bantuan untuk Israel sampai \$3 milyar dalam bentuk bantuan ekstra di luar jumlah tahunan yang diterimanya sekitar \$2 milyar serta sejumlah besar peralatan militer tambahan untuk modernisasi angkatan bersenjata termasuk dipercepatnya pengiriman pesawat-pesawat perang F-16, yang terbaru dari angkatan udara Amerika. Sedangkan Mesir mendapatkan bantuan Amerika Serikat \$ 2.1 milyar setiap tahun (Haekal, 1995:68). Demikian pula kepentingan ekonomi-politik Amerika Serikat di Timur tengah menjadi semakin besar dengan keberadaan negara Israel. Amerika Serikat tidak hanya memandang Israel sebagai “wakil” Barat di kawasan ini, namun juga berkaitan dengan kenyataan adanya dominasi ekonomi-politik etnik Yahudi di Amerika Serikat. Oleh karena itu bisa dipahami pula, jika Mesir dalam kebijakannya

didominasi kepentingan Amerika Serikat, hal ini mengakibatkan ketergantungan Mesir kepada Amerika Serikat baik secara ekonomi maupun militer.

Amerika Serikat memang sudah sejak lama menaruh perhatian terhadap wilayah timur tengah, terlebih terlaksananya perjanjian Camp David membuat terjalinnya hubungan Amerika Serikat dengan Mesir. Hal tersebut membuat semakin kuatnya pengaruh Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Ketertarikan Amerika Serikat terhadap wilayah Timur Tengah tidak lain karena faktor Sumber daya minyak bumi yang sangat melimpah di wilayah tersebut. Sumber daya minyak sangat dibutuhkan oleh negara-negara maju dan berkembang diseluruh dunia untuk keperluan industri dan militer, oleh karena itu Amerika Serikat ingin memastikan sumber daya minyak berhasil dikuasai untuk kepentingan politik internasionalnya (Sihbudi, 1993:89).

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami begitu besarnya dampak perjanjian Camp David baik bagi Mesir maupun bagi kawasan Timur Tengah maka penulis ingin membahas lebih dalam dampak perjanjian Camp David bagi Mesir yang dirumuskan dengan judul **“Perjanjian Camp David dan Dampaknya terhadap Hubungan Mesir dengan Negara-Negara Arab pada Masa Pemerintahan Anwar Sadat Tahun 1970-1981”**.

## 1.2 Penegasan Judul

Untuk menghindari salah penafsiran dan pemahaman terhadap judul penelitian di atas, maka penulis merasa perlu memberikan penegasan terhadap judul yang penulis gunakan yaitu **“Perjanjian Camp David dan Dampaknya terhadap Hubungan Mesir dengan Negara-Negara Arab pada Masa Pemerintahan Anwar Sadat Tahun 1970-1981”**.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh se-seorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak menurut KBBI adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Dampak menurut Waralah (2008) adalah sesuatu yang

diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yg mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).

Pengertian Dampak secara umum menurut Arif (2009), dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya 'sesuatu'. Dampak itu sendiri juga bisa berarti, konsekwensi sebelum dan sesudah adanya 'sesuatu'. Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak perjanjian damai Camp David yang dilakukan oleh Mesir dan Israel pada tanggal 17 September 1978. Perjanjian yang banyak ditentang oleh dunia Arab karena dengan adanya perjanjian ini Mesir dianggap secara tidak langsung mengakui eksistensi negara Israel.

Perjanjian Camp David sendiri merupakan perjanjian perdamaian antara Mesir dengan Israel yang berlangsung pada tanggal 17 September 1978. Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter memimpin perundingan rahasia yang berlangsung selama 12 hari antara presiden Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Perjanjian ini mendapatkan namanya dari tempat peristirahatan milik para presiden AS, Camp David, di Frederick County, Maryland.

Menurut Moeliono (1989:313) hubungan adalah suatu keadaan dimana adanya ikatan antara satu sama lain. Hubungan yang ditekankan dalam penelitian ini adalah hubungan internasional antara Mesir dengan negara-negara Arab (negara anggota LA) pasca terjadinya perjanjian Camp David. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Restra) Hubungan Internasional diartikan sebagai hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

Negara-negara Arab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh negara yang menjadi anggota Liga Arab. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya akan membahas hubungan Mesir dengan tiga negara saja yaitu : (a) Arab Saudi, (b) Libya, (c) Suriah. Alasan peneliti memilih ketiga negara tersebut karena Arab Saudi, Libya dan Suriah memiliki peran politik yang besar di kawasan Timur Tengah serta sering menjadi patner Mesir dalam perang menghadapi Israel.

Berdasarkan pengertian- pengertian diatas, maka maksud dari judul “Perjanjian Camp David dan Dampaknya terhadap Hubungan Mesir dengan Negara-Negara Arab pada Masa Pemerintahan Anwar Sadat” adalah Pengaruh pelaksanaan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada tanggal 17 September 1978 terhadap hubungan Internasional antara mesir dengan negara-negara anggota Liga Arab pada masa pemerintahan Anwar Sadat Tahun 1970-1981.

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Pembatasan ruang lingkup diperlukan agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari fokus permasalahan. Dalam penelitian ini penulis memberi batasan temporal, spasial, dan materi.

Ruang lingkup temporal penelitian ini adalah pada tanggal 15 Oktober 1970 sampai dengan 6 Oktober 1981, tanggal 15 Oktober 1970 dijadikan batas awal karena pada tanggal tersebut awal dimulainya kepemimpinan Anwar Sadat sebagai presiden Mesir. Tanggal 6 Oktober 1981 dijadikan batas akhir dengan pertimbangan pada tanggal tersebut presiden Anwar Sadat tewas dibunuh saat parade militer dan diduga akibat dari kebijakan-kebijakan yang telah dia ambil termasuk kebijakan melakukan perjanjian damai dengan Israel.

Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah mesir yang merupakan negara pelaku perajakan Camp David. Sedangkan ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah:

1. kebijakan politik luar negeri Mesir sebelum dan sesudah terlaksananya perjanjian Camp David
2. hubungan politik dan ekonomi Mesir dengan berbagai Negara Arab pada pasca Perjanjian Camp David
3. dampak perjanjian Camp David terhadap hubungan Mesir dengan negara-negara Arab

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. apa yang melatarbelakangi munculnya perjanjian Camp David?
2. bagaimanakah Dampak dari adanya perjanjian Camp David terhadap Mesir dan hubungannya dengan negara-negara Arab?

#### **1.5 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mendeskripsikan secara logis mengenai latar belakang munculnya perjanjian Camp David.
2. untuk mendeskripsikan dampak perjanjian Camp David tahun 1978 terhadap hubungan Mesir dengan negara-negara Arab

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. bagi peneliti, sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah, serta memperdalam pengetahuan kita tentang kondisi politik di Timur Tengah khususnya Mesir pasca perjanjian Camp David,
2. bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat menambah pengetahuan dan penguasaan materi Sejarah Asia Barat Daya, khususnya negara Mesir,
3. bagi almamater merupakan pelaksanaan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Dharma penelitian.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini akan mengemukakan kajian tentang pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan dampak perjanjian Camp David terhadap hubungan Mesir dengan negara Arab pada masa pemerintahan Anwar Sadat. Kajian Teori dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Rais (1989) dalam bukunya yang berjudul "*Politik Internasional Dewasa ini*", menjelaskan bahwa hubungan internasional antar negara ada dua macam yaitu hubungan antar negara bersifat kooperatif dan hubungan antar negara bersifat kompetitif. Hubungan yang bersifat kooperatif terjadi jika dua atau lebih negara berusaha bekerjasama untuk mencapai kepentingan bersama baik ditingkat regional maupun internasional. Sedangkan hubungan kompetitif terjadi jika dua negara atau lebih saling bersaing dalam mencapai suatu kepentingan tertentu. Persaingan ini seringkali menyebabkan perang, sehingga perang sering di anggap sebagai kelanjutan politik antar bangsa dengan menggunakan kekerasan. Buku ini menjadi salah satu rujukan bagi peneliti untuk menganalisis sejauh mana sikap politik yang dilakukan pihak Mesir dibawah kepemimpinan Anwar Sadat dalam menjalankan roda pemerintahan Mesir terutama dalam hal kebijakannya untuk melakukan perjanjian damai dengan pihak Israel yang telah memenangkan peperangan 6 hari. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis ingin memfokuskan pada kajian perjanjian Camp David yang memiliki dampak luar biasa bagi Mesir, negara yang tergabung dalam liga Arab serta negara Palestina yang terjajah.

Huntington (2001) dalam bukunya yang berjudul "*Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*" menjelaskan pemikirannya sekurang-kurangnya ada enam alasan yang dijadikan sebagai dasar yang dipakai untuk menjelaskan mengapa politik dunia ke depan akan sangat dipengaruhi oleh benturan antar peradaban. Pertama, perbedaan peradaban tidak hanya nyata, tetapi sangat mendasar. Selama berabad-abad perbedaan antarperadaban telah menimbulkan konflik paling keras dan paling lama. Kedua, dunia ini sudah semakin menyempit sehingga interaksi antara orang yang berbeda peradaban semakin meningkat. Ketiga, proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial

diseluruh dunia telah mengakibatkan carut-marutnya masyarakat dari akar-akar identitas-identitas lokal yang telah berlangsung lama. Kecenderungan ini menyisakan ruang kosong yang kemudian diisi oleh identitas agama, seringkali dalam gerakan berlabelkan “fundamentalisme”. Keempat, dominasi peran Barat menimbulkan reaksi *de-westernisasi* di dunia non-Barat. Kelima, perbedaan budaya kurang bisa menyatukan, dibanding perbedaan politik dan ekonomi. Keenam, kesadaran peradaban regionalisme politik atau ekonomi. Buku ini menjadi salah satu sumber referensi bagi penulis karena menjelaskan tentang peran dunia barat dalam hal perpolitikan dunia, tidak dipungkiri lagi bahwa Amerika Serikat dan negara sekutu lainnya selalu ikut campu dengan urusan internal negara lain. Hal ini sudah dianggap hal lumrah karena Amerika Serikat menginginkan sumber daya alam di suatu negara yang akan dimasuki oleh pengaruhnya. Sama halnya dengan keadaan Mesir dibawah kepemimpinan Anwar Sadat yang berada dalam bawah tekana dunia barat untuk segera melakukan perjanjian damai dengan pihak Israel, hal ini tentu perlu dilakukan mengingat Mesir menjadi salah satu negara dengan penghasil minyak mentah nomor 3 di wilayah Afrika, sehingga Posisi mesir menjadi cukup strategis karena faktor sumber daya alamnya tersebut. Oleh karena itu, Peneliti ingin menganalisis lebih dalam sejauh mana peran dunia barat dalam perjanjian Camp David yang memaksa Mesir harus tunduk patuh terhadap isi perjanjian tersebut.

Sihbudi (2007) dalam bukunya “*Menyandera Timur Tengah*” menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah mempunyai arti penting tersendiri bagi Dunia Barat, Faktor kekayaan alam khususnya minyak yang sangat melimpah menjadi daya tarik bagi kekuatan-kekuatan ekstra regional. Keinginan negara-negara barat khususnya AS untuk menanamkan pengaruhnya menyebabkan kawasan ini rentan terjadi konflik. Keinginan AS untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan ini berkaitan dengan fakta belum ditemukannya sumber energi alternatif bagi perindustrian Barat. Kepentingan ekonomi-politik AS di Timur Tengah semakin besar semenjak berdirinya negara Israel. Amerika Serikat tidak hanya melihat Israel sebagai “wakil” (secara cultural-historis maupun sosio-politis) Barat di kawasan ini, namun juga berkaitan dengan kenyataan adanya dominasi ekonomi-

politik etnik Yahudi di AS. Oleh karena itu, tidak mengherankan AS selalu membela Israel, meskipun Israel sering melanggar hukum Internasional. Buku Karya Sihubudi ini menunjukkan akan dominasi peran Amerika Serikat dalam setiap pergerakan politik yang dilakukan oleh Israel selama menginvasi wilayah Palestina. Sehingga bagi penulis, Buku ini menjadi salah satu sumber referensi untuk dijadikan bahan analisis tambahan dalam melakukan penelitian terkait sikap politik Mesir dibawah kepemimpinan Anwar Sadat yang harus melakukan perjanjian damai dengan pihak Israel di Camp David yang akhirnya memberikan dampak cukup luar biasa untuk negara Mesir kedepannya. Salah satunya adalah sikap perlawanan dan ketidakpercayaan rakyat Mesir terhadap Presiden Anwar Sadat yang puncaknya adalah kematian Anwar Sadat dalam parade Militer.

Sihubudi (1995) dalam bukunya "*Profil Negara-Negara Timur Tengah*" mengemukakan sebagai salah satu penguasa berdirinya Liga Arab (LA) Mesir sangat berpengaruh di kancah perpolitikan Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan usaha penyelesaian sengketa Arab-Israel yang berintikan masalah Palestina. Keterlibatan mesir secara langsung dalam sengketa Arab-Israel, telah memaksa Mesir banyak berperan sebagai aktor politik penting dalam lingkaran Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Maka secara tidak langsung tercatatlah mesir sebagai negara yang memimpin perpolitikan di kawasan Timur Tengah pada waktu itu. Buku ini memberikan gambaran utuh bagi peneliti tentang kawasan timur tengah yang diisi oleh negara-negara semenanjung Arabia, kepentingan peneliti disini adalah untuk mendapatkan informasi utuh tentang negara-negara arab yang nantinya akan melakukan hubungan diplomatik dengan mesir selama masa pemerintahan Anwar Sadat yang diakhir dengan sikap pertentangan dan penolakan atas sikap negara Mesir yang melakukan perjanjian damai dengan pihak Israel tanpa meminta persetujuan langsung dengan pihak negara-negara Arab dibawah naungan Liga Arab.

Sihubudi (1993) dalam bukunya "*Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*", menjelaskan pada Oktober 1973 terjadilah perang Yom Kippur (Perang Ramadhan) yang di latar belakang oleh keinginan bangsa Arab untuk membalas kekalahan mereka pada perang Enam Hari sekaligus merebut kembali wilayah

yang telah dikuasai Israel pasca perang Enam Hari. Dalam perang tersebut nama Anwar Sadat presiden Mesir menjadi perbincangan dalam percaturan politik Internasional, hal ini dikarenakan keberhasilan Mesir menghancurkan benteng pertahanan Israel (Lini Bar Lev) yang dibangun sedemikian rupa kuatnya sehingga dianggap tidak mungkin dapat ditembus serangan musuh. Perang tersebut telah menelan korban terbesar dipihak Israel (2500 orang) dibandingkan perang Arab-Israel sebelum-sebelumnya. Kepentingan peneliti dalam buku ini adalah sikap negara Mesir ketika harus memilih antara melakukan perjanjian damai dengan pihak Israel untuk mendapatkan bantuan ekonomi dari pihak Amerika Serikat atau melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan pihak Israel di tanah palestina dengan mengorbankan masa depan ekonomi bangsa Mesir yang semakin terpuruk. Sehingga bagi penulis buku ini menjadi salah satu referensi yang akan melengkapi data penelitian tentang perjanjian Camp David dan dampaknya bagi hubungan diplomatik negara Mesir dengan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab.

Husein (1995) dalam bukunya yang berjudul "*Prospek Perdamaian di Timur Tengah: Sebuah Tilikan Latar Belakang*" menjelaskan terjadinya konflik yang berlarut-larut khususnya masalah Arab-Israel membuat kawasan ini menjadi perhatian dunia internasional. Suasana perang dingin juga mempengaruhi setiap langkah internasional yang ditujukan pada penyelesaian sengketa di Timur Tengah, karena setiap tindakan AS akan di hadapi Uni Soviet, keterlibatan kedua negara ini malah menyulitkan penyelesaian masalah Arab-Israel. Perjanjian Camp David yang disarankan Amerika Serikat sebagai solusi agar terciptanya perdamaian di timur tengah diterima oleh Mesir yang sedang mengalami krisis ekonomi, bagi Mesir perjanjian tersebut dianggap sebagai jalan pintas untuk mengembalikan kondisi ekonomi Mesir, namun disisi lain hubungan diplomatik Mesir dengan negara-negara Arab merenggang dan Mesir di anggap sebagai penghianat karena dengan perjanjian tersebut secara tidak langsung Mesir mengakui eksistensi negara Israel di timur tengah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis terletak pada perjanjian Camp David yang memberikan dampak cukup luar biasa bagi masa depan negara Mesir yang masalah hubungan

diplomatnya dengan negara-negara Arab semakin renggang, sedangkan di sisi lain di dalam Negara Mesir sendiri terjadi pergolakan penolakan dan pemberontakan terhadap pemerintahan Anwar Sadat.

Findley (1995) dalam bukunya “*Diplomasi Munafik Ala Yahudi: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel*” menjelaskan berlanjutnya proses perundingan mengenai masalah-masalah di Timur Tengah terlebih lagi masalah palestina dan Israel sangat tergantung pada dua hal, pertama adalah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat sebagai meditor proses perundingan perdamaian Arab – Israel. kedua adanya kesanggupan dan persatuan bangsa Arab. Tidak adanya persatuan dari bangsa Arab sehingga Amerika Serikat dan Israel terus menekan bangsa palestina untuk terus mengikuti dan mentaati hasil perundingan perdamaian. Buku ini menjadi salah satu sumber referensi peneliti untuk melengkapi hasil penelitian tentang perjanjian Camp David. Kepentingan peneliti dalam buku ini adalah untuk menganalisis sejauh mana keikutsertaan Amerika Serikat selama proses perjanjian Camp David, serta apa saja yang diinginkan Amerika Serikat ketika perjanjian Camp David itaati oleh Negara Mesir.

Saikal (2006) dalam bukunya “*Islam dan Barat, Konflik atau Kerjasama*” menjelaskan secara garis besar berbagai tindakan dan intervensi Amerika Serikat di dunia Islam sejak pasca perang dunia II hingga invasinya ke Irak. Semua tindakan memiliki tujuan untuk memperkuat kepentingan Amerika Serikat di dunia Islam berupa hegemoni dan sumber daya minyak. Selama perang dingin, Amerika Serikat memanfaatkan daerah Timur Tengah sebagai sarana untuk menghentikan pengaruh Uni Soviet yang semakin meluas. Berbagai macam bantuan ekonomi dan militer diberikan bahkan Amerika Serikat mendirikan pangkalan militer di setiap negara. Selain itu, tak jarang Amerika Serikat, yang selalu tampil sebagai pendekar demokrasi, menjadikan penguasa rezim diktator sebagai “kawan baik” yang saling menguntungkan untuk kepentingannya. Amerika Serikat tidak peduli siapapun yang menjadi kawan asalkan kepentingannya terjaga. Melalui kerja sama ini juga Amerika Serikat dan sekutunya mampu menguasai ladang minyak di Timur Tengah dengan

memasukkan berbagai perusahaan minyak multinasional. Amerika Serikat mengeruk keuntungan yang besar, sedangkan pemerintah lokal hanya mendapatkan sedikit saja keuntungan dari penjualan minyaknya. Perbedaan penelitian dalam buku ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti terletak pada aspek perjanjian Camp David yang memaksa Mesir dan negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab untuk mematuhi segala isi perjanjian tersebut.

Haekal (1986) dalam bukunya "*Anwar Sadat: Kemaru Kemarahan*" menjelaskan kebijakan yang diambil oleh Anwar Sadat untuk melakukan perjanjian damai dengan Israel di latar belakang oleh kondisi ekonomi Mesir yang memburuk. Hal ini disebabkan ikut sertanya Mesir dalam perang Arab-Israel sejak berdirinya negara tersebut. Kondisi perekonomian Mesir yang memburuk dan dikuasainya sebagian wilayah milik Mesir oleh Israel membuat seakan-akan tidak ada jalan bagi Mesir kecuali melakukan perjanjian damai dengan Israel. Namun jika dilihat kembali setelah perang Yom Kippur Sadat seharusnya menyadari besarnya kemenangan yang ada di tangannya. Dia sudah memegang semua kartu tertinggi, Senjata berupa minyak sudah dikuasainya, pendapat masyarakat baik kalangan Arab maupun sebagian besar dunia kompak mendukungnya, serta Uni Soviet masih bersedia membantunya. Tetapi semuanya disia-siakan. Dia malah memilih membangun kawasan itu bersama kawan barunya Henry Kissinger (Amerika Serikat). Kedekatan Anwar Sadat dengan Amerika Serikat inilah yang menjadi penjamin bahwa perjanjian perdamaian Mesir dengan Israel akan benar-benar terjadi. Kepentingan peneliti dalam buku ini adalah untuk menganalisis profil dari presiden Mesir Anwar Sadat yang memimpin dari tahun 1970-1981, serta kebijakan-kebijakan yang cukup kontroversial, salah satunya dalam kepentingan peneliti adalah kebijakan melakukan perjanjian damai dengan pihak Israel yang telah menjajah tanah Palestina, sehingga hal tersebut berdampak pada masa depan pemerintahan Anwar Sadat yang diakhiri dengan pemberontakan dan pergolakan di dalam negeri Mesir serta hubungan diplomasi antar Mesir dengan Negara-Negara Arab yang tergabung dalam organisasi Liga Arab.

Berdasarkan beberapa sumber dan hasil penelitian mengenai Mesir pada masa pemerintahan Anwar Sadat, masih belum terdapat kajian yang khusus mengenai Dampak Perjanjian Camp David Terhadap Hubungan Mesir Dengan Negara-Negara Arab Pada Masa Pemerintahan Anwar Sadat. Kajian-kajian sebelumnya hanya terfokus pada perdamaian Mesir-Israel dan pemikiran Anwar Sadat tentang demokrasi di Mesir. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji tentang Dampak Perjanjian Camp David Terhadap Hubungan Mesir Dengan Negara-Negara Arab Pada Masa Pemerintahan Anwar Sadat, yang lebih terfokus kepada perjanjian damai Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1979.

Agar mempermudah peneliti dalam melakukan dan mengembangkan penelitian mengenai “dampak perjanjian Camp David terhadap hubungan Mesir dengan negara-negara Arab pada masa pemerintahan Anwar Sadat”, maka peneliti menggunakan pendekatan politik, menurut Budiarjo (2002:8) politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum, untuk melaksanakan kebijakan tersebut perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin akan timbul. Pendekatan politik dipakai untuk melihat kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri yang diambil oleh Anwar Sadat sebelum perjanjian Camp David dan pasca perjanjian Camp David.

Selanjutnya untuk mempertajam hasil analisis dengan pendekatan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menggunakan teori pembuat kebijakan Laswell ( dalam Syafie, 1992:35) mengemukakan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Pembuatan kebijakan dalam analisa politik lebih mengarah pada proses pembuatan keputusan. Menurutnya suatu keputusan merupakan hasil dari suatu pertentangan yang membentuk kekuasaan atau merupakan hasil dari interaksi dalam arena politik. Teori ini digunakan dalam menganalisis kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah khususnya pada masa Presiden Anwar Sadat, dimana pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan berbagai kebijakan politik.

Ada 2 akibat yang timbul dari penetapan kebijakan, yaitu: kebijakan yang *Berorientasi Pada Pelayanan Public* dalam arti sesuai dengan makna demokrasi dan kebijakan yang *Meracuni Public* kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja, dan hal dampak yang kedua ini sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu fungsi politik untuk membuat kebijakan dan kebijakan ada karena 2 faktor yaitu; adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan pun berubah-ubah. Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara; *Pembuatan Peraturan UU, Perencanaan Kegiatan, Aneka Intervensi Terhadap Ekonomi/Social Masyarakat*. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah. Teori kekuasaan ini digunakan dalam menganalisis mengenai apa saja kebijakan penguasa yang terjadi di Mesir ketika Anwar Sadat menjadi presiden sehingga bisa membuat perubahan dalam tatanan masyarakat Mesir dengan kebijakan Perjanjian damai Camp David dengan pihak Israel.

### BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa lampau (Gottschalk, 1986:32). Metode penelitian sejarah adalah prosedur dari sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak – jejak itu termuat dalam sumber sejarah (Notosusanto, 1917:17). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah cara yang digunakan seorang peneliti untuk mendapatkan jawaban berupa kesimpulan dari suatu persoalan dengan menggunakan metode – metode sejarah yang ada. Metode sejarah yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi, (4) Historiografi. Berikut akan penulis jelaskan ke-4 langkah metode penelitian sejarah dalam skripsi ini :

#### 1. Heuristik

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti mencari sumber–sumber sampai mendapatkan data. Sumber yang berhasil dikumpulkan berupa sumber tertulis baik berupa artikel, buku, dokumen, dan penelitian terdahulu. Sumber data yang berhasil dikumpulkan kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dimaksud berupa penelitian–penelitian sebelumnya yang berupa skripsi dan buku–buku tentang Timur Tengah, Khususnya tentang Politik Mesir dengan Perjanjian Camp David antara pihak Mesir dengan pihak Israel. Sedangkan sumber sekunder adalah majalah dan dokumen lainnya yang menunjang tentang pembahasan skripsi yang dilakukan peneliti. Sebelum melakukan penelitian, pertama–tama peneliti melakukan penelitian di Perpustakaan dengan mencari skripsi yang berhubungan dengan pembahasan dan mencari informasi di internet yang kemudian dilanjutkan dengan membaca buku–buku primer tentang berupa buku karangan Mohamed Heikal seorang jurnalis dengan judul *Anwar Sadat: Kemaru Kemarahan* yang diterjemahkan oleh Arwah Setiawan. Sedangkan sumber sekunder berupa jurnal–

jurnal, skripsi, buku, majalah Koran yang berkaitan dengan perjanjian Camp David.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan studi literature atau kepustakaan yaitu cara pengumpulan data melalui penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Pengumpulan data dilakukan di UPT Perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah, dan buku koleksi pribadi.

## 2. Kritik

Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah ini kritik. Setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah mengadakan kritik sumber, baik sumber primer maupun sekunder dilakukan kritik. (Sjamsudin, 1996:104). Kritik juga digunakan penulis dalam pengujian sumber-sumber sejarah agar menjadi sumber yang kredibel keasliannya Pada langkah kritik ini ada dua macam yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk menilai apakah sumber yang digunakan dalam penelitian ini asli atau tidak. Langkah yang dilakukan adalah dengan melihat sampul, tahun terbit, pengarang, judul, serta latar belakang.

Setelah kritik ekstern selanjutnya yaitu kritik intern. Kritik intern yang dilakukan peneliti adalah melakukan penilaian secara kritis sumber – sumber yang telah didapat dengan cara membandingkan persamaan ataupun perbedaan beberapa penafsiran dari buku-buku yang diperoleh dari setiap data. Dengan adanya kritik intern ini penulis bisa mengetahui apakah sumber yang digunakan tersebut sudah bisa menjadi fakta sejarah. Seperti halnya dalam buku penunjang yang ditulis orang lain terkait dengan buku karangan Mohamed Heikal seorang jurnalis dengan judul *Anwar Sadat: Kemaru Kemarahan* yang diterjemahkan oleh Arwah Setiawan. Melalui kritik ekstern, penulis menentukan kredibilitas dan reabilitas buku ini apakah sesuai dan tidak menyimpang dengan pembahasan

peneliti. Setelah mengkaji sumber yang ada penulis dapat menghimpun data-data yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian mengenai Dampak Perjanjian Camp David Bagi Mesir terhadap Negara-Negara Arab.

### **3. Interpretasi**

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah interpretasi, data atau sumber sejarah yang dikritik akan menghasilkan fakta yang akan digunakan dalam penulisan sejarah. Interpretasi yang dilakukan oleh peneliti adalah proses menghubungkan – hubungkan atau mengkait-kaitkan fakta sejarah yang telah diwujudkan satu sama lainnya sehingga menjadi rangkaian yang masuk akal dalam arti menunjukkan keserasian antara satu dengan lainnya (Hariyono, 1995:110). Fakta – fakta sejarah harus diinterpretasi atau ditafsirkan agar suatu peristiwa dapat direkonstruksikan dengan baik, yaitu dengan cara menyeleksi, menyusun data, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta.

Pada langkah interpretasi ini penulis melakukan penafsiran dan pemaknaan fakta-fakta sejarah dengan memahami maksud dari setiap fakta sejarah berdasarkan pada aspek bahasan yaitu dampak perjanjian Camp David terhadap hubungan Mesir dengan negara Arab pada masa pemerintahan Anwar Sadat. Setelah itu dirangkai dan disusun dengan kronologis menjadi suatu peristiwa, sehingga dapat diperoleh suatu kisah sejarah atau cerita sejarah yang benar sesuai realita peristiwanya. Kegiatan interpretasi ini terbagi menjadi dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis yaitu menguraikan data-data yang telah diperoleh selama ini terkait dampak perjanjian Camp David terhadap hubungan Mesir dengan negara Arab pada masa pemerintahan Anwar Sadat, sedangkan sintesis yaitu menghubungkan atau menyatukan data-data yang telah diperoleh sehingga ditemukan fakta sejarah (Kuntowijoyo, 2013:78).

Penulis dalam hal ini melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang telah terkumpul untuk dirangkai dan dihubungkan menjadi bentuk yang logis, rasional, dan objektif. Fakta itu kemudian disusun secara kronologis sehingga didapat suatu fakta yang realistis mengenai dampak perjanjian Camp David

terhadap hubungan Mesir dengan negara Arab pada masa pemerintahan Anwar Sadat.

#### **4. Historiografi**

Langkah terakhir yaitu historiografi. Menurut Gottschalk (1983:32) historiografi adalah kegiatan rekonstruksi yang imajinatif berdasarkan data yang telah diperoleh dengan menempuh proses metode sejarah. Historiografi dilakukan untuk menyampaikan hasil rekonstruksi imajinatif dari masa lampau itu sebagai jejaknya, sehingga merupakan imajinatif ilmiah. Dalam proses ini diperlukan suatu kemampuan dan kemahiran dari penulis untuk merangkai fakta-fakta sejarah sehingga menjadi suatu cerita yang kronologi, sistematis, objektif, logis dan menarik. Dengan demikian, diharapkan dapat, merekonstruksi “Perjanjian Camp David dan Dampaknya terhadap hubungan Mesir dengan negara Arab pada masa pemerintahan Anwar Sadat tahun 1970-1981”

Penyajian dari hasil penelitian ini adalah penyusunan kisah sejarah dalam bentuk karya ilmiah skripsi. Bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan, adanya batasan ruang lingkup, perumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian. Sementara bab 2 tinjauan pustaka yang berisi kajian dari hasil penelitian terdahulu tentang dampak perjanjian Camp David. Sedangkan bab 3 berisi tentang penyajian metode penelitian sejarah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penjelasan tentang kondisi ekonomi, politik dalam dan luar negeri, serta kondisi masyarakat Mesir pada masa pemerintahan Anwar Sadat merupakan isi dari bab 4. Bab 5 menjelaskan mengenai isi perjanjian Camp David, dan dampak perjanjian camp david terhadap hubungan Mesir dengan Negara-negara Arab. Bab 6 penutup berisi simpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.

## BAB 5. DAMPAK PERJANJIAN CAMP DAVID

Konflik yang terjadi antara Israel dan negara-negara Arab pada mulanya diawali oleh adanya deklarasi kemerdekaan Israel pada 1948 pasca adanya Mandat Britania, yang kemudian direspon negara-negara Arab dengan serangannya ke Israel. Perseteruan negara-negara Arab dengan Israel masih terus berlanjut dengan adanya perang pada 1967. Dimana pada perang tersebut pihak Israel selalu berhasil memukul negara-negara Arab. Kegagalan negara-negara Arab pada perang 1967 kemudian menyebabkan tumbuhnya gerakan kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, beberapa kelompok militer Palestina melancarkan berbagai gelombang serangan terhadap warga-warga Israel di seluruh dunia. Sejak itulah konflik antara Israel dan Palestina semakin meruncing. Hingga saat ini konflik antara Israel dan Palestina belum juga menemukan resolusi yang pas bagi kedua belah pihak (Pradana 2012:43).

Berbagai upaya proses perundingan damai telah dilakukan, yaitu Camp David I pada tahun 1979, Perjanjian ini menghasilkan satu putusan yaitu pengakuan Israel oleh Mesir, dan sebagai imbalannya Israel menarik pasukannya dari Sinai. Sayangnya perjanjian ini tidak berhasil karena perang Arab-Israel kembali berkobar. Yang kedua yaitu Konferensi Perdamaian di Madrid pada tahun 1991, Konferensi ini diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Uni Sovyet dengan mengajak negara-negara Arab seperti Suriah, Mesir, Lebanon, Yordania dan pihak Palestina, namun bukan PLO. Akibatnya perjanjian ini dianggap gagal karena tidak mengajak wakil sah Palestina yang diakui PBB yakni PLO. Yang ketiga yaitu Perjanjian Oslo I pada tanggal 13 September 1993, Perundingan ini dihadiri oleh Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin, disaksikan oleh Bill Clinton dan Raja Hussein. Hasil utama perjanjian ini adalah pengakuan eksistensi PLO dan Israel dengan cara pembentukan dua negara dalam satu wilayah. Selanjutnya yaitu Perjanjian Oslo II pada tanggal 28 September 1995, Perundingan ini sebagai kelanjutan perundingan pertama dan memutuskan untuk memberikan otonomi terbatas pada PLO di West Bank yang meliputi 7 kota yaitu Jenin, Nablus,

Hebron, Tulkarem, Qaqiyah, Ramallah, dan Bethlehem. Perundingan ini pun dinilai gagal karena adanya protes kelompok akar rumput dari kedua pihak. (Fuhaidah 2012:54)

### 5.1 Dampak Bagi Israel

Israel sebenarnya masih setengah hati dalam menerima hasil perjanjian Camp David. Hal ini dikarenakan isi dari perjanjian menimbulkan persepsi yang berbeda antara pihak Israel dan pihak Mesir. Perbedaan persepsi itu mengenai perbedaan arti otonomi bagi rakyat Yordania dan Jalur Gaza dan kekerasan Israel yang masih ingin menguasai daerah pendudukan dan penolakan terhadap kehadiran PLO merupakan suatu tanda-tanda yang mengkhawatirkan akan gagalnya perjanjian Camp David. Kekhawatiran terhadap gagalnya Camp David semakin tampak dengan langkah-langkah Israel yang merupakan manuver Politik Israel terhadap Arab, yaitu:

- 1) **Serangan terhadap PLO di Libanon.** Libanon selatan atas persetujuan dan perlindungan dari pendudukan muslim Libanon para pengungsi Palestina boleh tinggal di tempat itu. Penduduk Palestina tersebut bertekad untuk melakukan perlawanan secara gerilya terhadap Israel melalui organisasi Pembebasan palestina dari kekuasaan Israel dan mendirikan suatu negara yang demokratis, yang memberikan kedudukan yang sama kepada penduduknya tanpa membedakan ras maupun agama. Organisasi ini berdiri pada tanggal 2 Juni 1964. Israel menganggap organisasi ini adalah organisasi teroris Palestina dan mereka tidak mau mengakuinya padahal negara-negara Arab mengakuinya sebagai wakil dari Palestina. Sebagai upaya bagi Israel untuk menghancurkan maka pada tahun 1982 Israel menyerang PLO yang berada di Libanon selatan sebagai tempat pengungsiannya. Sebagai "*Casus Bellum*" Israel menuduh PLO bertanggungjawab terhadap penembakan diplomat Israel di Libanon walaupun Yaser Arafat sebagai pemimpin PLO menolak

tuduhan tersebut. Sasaran serangan Israel adalah di Beirut Barat. Upaya Israel itu ternyata berhasil sebab 7000 pasukan PLO berhasil keluar dari Beirut Barat. Israel menganggap bahwa dengan serangan tersebut struktur organisasi PLO dapat dihancurkan dan Palestina kehilangan organisasi yang diandalkan untuk membebaskan Palestina lenyap dan cita-cita kemerdekaan pasti gagal.

- 2) **Serangan dan pendudukan Wilayah Arab.** Setelah perjanjian Camp David dimana dengan semangat perjanjian damai yang telah diupayakan oleh Anwar Sadat untuk Israel maupun Arab hendaknya menjaga kedamaian akan tetapi ternyata Israel melanggar upaya damai tersebut dengan melakukan serangan serta berusaha menduduki wilayah Arab. Adapun wilayah-wilayah Arab yang diserang dan diduduki oleh Israel adalah : (a) **Yerusalem.** Negara-negara Arab menginginkan agar Yerusalem menjadi wilayah Palestina akan tetapi Israel mengklaim bahwa wilayah tersebut dan dengan dengan gencarnya terus mendirikan pemukiman baru. Bagi Menachem Begin Ofonir Diplomatik atas Yerusalem salah satu cara untuk memobilisasi nafsu Religi Nasionalistasnya, serta kepercayaan bahwa Yerusalem adalah Ibukota dan tanah yang tidak dapat dibagi. Obsesinya untuk menguasai Yerusalem nampak ketika penandatanganan perjanjian Camp David di Washinton ketika berkata bahwa “pembebasan Yerusalem merupakan suatu kebahagiaan baginya”. Upaya Menachem Begin mendapatkan dukungan dari Kneset Israel yang didominasi oleh partai Likud dengan partner utamanya NRP (*National Religious Party*) yang sekaligus merupakan fraksi ketidaksi di dalam kabinet Israel. Pada bulan Desember 1980 setuju menganeksasi Yerusalem sebagai Ibukota baru. Sebagai protes atas sikap Israel, Sadat secara terpisah mengentikan pembicaraan secara otonomi yang sedang

berlangsung antara kedua negara tersebut. Dalam suatu memo resmi pada tanggal 13 Oktober 1980, Mesir mengajukan permintaan khusus agar Yerusalem dikembalikan kepada Palestina. (b) *Operasi Babilon*. Peristiwa yang kedua adalah pengeboman reaktor nuklir Irak yang dilancarkan Israel pada tanggal 7 Juni 1981. Serangan itu semakin merusak citra Mesir di Mata negara-negara Arab, karena 48 Jam sebelumnya Begin dan Sadat mengadakan pertemuan di Sharm Al-Syeikh dalam rangka implementasi ekonomi Palestina sesuai dengan Camp David. Serangan Israel dilatarbelakangi oleh faktor dari dalam dan luar negeri Israel. Dari dalam negeri Israel bertujuan untuk menatasi isu tentang pengunduran dirinya menjelang pemilu 1981. Pengunduran diri itu disebabkan karena tidak sebandingnya anggaran pertahanan dan anggaran kesejahteraan. Menachem Begin menyatakan bahwa lebih tingginya anggaran pertahanan karena adanya ancaman dari Irak. Faktor dari luar adalah mencegah pendekatan Amerika Serikat terhadap Irak. Sejak semula Menachem Begin telah mengkhawatirkan perkembangan politik Timur Tengah setelah perjanjian Camp David terutama tentang kemoderatan sikap Irak yang dimotori dengan Arab Saudi menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Untuk mengacaukan hubungan ini, Menachem Begin menggunakan pesawat Amerika Serikat dalam operasinya. Menachen Begin dan pemerintah Israel khawatir perkembangan politik dan militer Irak karena ini berada dalam barisan front konfrontasi menghadapi Camp David. (c) *Aneksasi Golan*. Setahun setelah Israel menganeksasi Yerusalem tepatnya tanggal 14 Desember 1981 Arab dikejutkan dengan adanya aneksasi Golan. Dataran Golan merupakan dataran tinggi yang subur sangat berarti bagi para petani dengan curah hujan berkisar 350 sampai 8000 mili meter pertahunnya menjadikan

tanahnya sangat subur dan potensial bagi lahan pemukiman dan lahan pertanian yang sedang dijalankan oleh pemerintah Israel. Secara politik aneksasi Golan mendukung tujuan Israel yang ingin mengisolasi Mesir dari dunia Arab. Terlebih dengan tidak diterimanya perjanjian Camp David karena tidak menyinggung PLI dan Golan merupakan wilayah Suriah. Aneksasi Golan merupakan pukulan terhadap Anwar Sadat dan menganggap Menachem Begin telah membunuh semangat persetujuan Camp David.

Dengan serangan-serangan tersebut maka benarlah bahwa Israel sebenarnya tidak berniat untuk menumbuhkan perdamaian di Timur Tengah. Dengan serangan-serangan itu Mesir semakin dikucilkan dari dunia Arab semakin menanjak sebagai pemimpin Arab yang baru.

## 5.2 Dampak Bagi Mesir

Mesir mulanya negara paling konsisten dalam menentang Israel pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel, dengan beberapa kali melakukan perlawanan militer terhadap Israel namun kini telah luntur. Salah satu manuver dramatis Mesir (Anwar Sadat) adalah prakarsanya membuat perdamaian dengan Israel. Inisiatifnya ini dimulai dengan kunjungan ke Yerusalem dan pidatonya di depan Parlemen Israel, *Knesset*, pada November 1977 (Tessler, M. 1989:3)

Dampak perjanjian *Camp David* besar sekali pada politik luar negeri Mesir, terutama dalam lingkungan Dunia Arab. Mesir dikeluarkan sebagai anggota Liga Arab, dan markas pusat Liga Arab dipindahkan dari Kairo ke Tunis. Berbagai bantuan dari negara-negara Arab dihentikan dan Mesir praktis terkucil dari Dunia Arab, karena telah melakukan perjanjian perdamaian tersendiri (*separate peace*) yang bertentangan dengan kesepakatan antar-Arab untuk hanya menerima penyelesaian perdamaian yang menyeluruh (*comprehensive peace*) (Tessler, M. 1989:211).

Dalam lingkaran OKI maupun GNB, Mesir tidak banyak mendapat dukungan terbuka; banyak negara yang lebih menampilkan sikap *reserve* untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara Arab lain yang menentang *Camp David*. Karena *Camp David* hasil prakarsa AS tanpa mengikutsertakan Uni Soviet, jelas Uni Soviet tidak menyatakan dukungannya pada hasil tersebut. Sikap Uni Soviet yang sudah ‘dingin’ terhadap Mesir karena tindakan Sadat memulangkan semua penasihat militer Rusia, makin merenggang karena diabaikannya Uni Soviet dalam proses perundingan *Camp David* (Sihbudi, 1979:160). Demikianlah, maka sejak *Camp David* ruang gerak bagi pelaksanaan bagi politik luar negeri Mesir menjadi terbatas sekali.

Menanggapi hasil *Camp David* itu, diadakan pertemuan puncak negara-negara Arab di Baghdad yang mengeluarkan pernyataan “*mengutuk perjanjian Camp David*.” Dengan pernyataan itu Mesir bukan saja mengalami isolasi politik, melainkan juga dibekukannya sumber bantuan keuangan yang sedianya diterima dari beberapa negara petro dolar Arab (Dishon, D. 1979:214-229).

Sebenarnya Israel menerima perjanjian damai dengan Mesir pada 1979 hanya setelah Mesir dan Amerika Serikat secara mendasar *setuju untuk mengabaikan bangsa Palestina*. Disisi lain, Amerika Serikat menjanjikan bantuan untuk Israel sampai \$3 milyar dalam bentuk bantuan ekstra di luar jumlah tahunan yang diterimanya sekitar \$2 milyar serta sejumlah besar peralatan militer tambahan untuk modernisasi angkatan bersenjata termasuk dipercepatnya pengiriman pesawat-pesawat perang F-16, yang terbaru dari angkatan udara Amerika (Findley, P. 1995:294). Sedangkan Mesir mendapatkan bantuan Amerika Serikat \$ 2.1 milyar setiap tahun. Demikian pula kepentingan ekonomi-politik AS di Timur tengah menjadi semakin besar dengan keberadaan negara Israel. AS tidak hanya memandang Israel sebagai “wakil” Barat di kawasan ini, namun juga berkaitan dengan kenyataan adanya dominasi ekonomi-politik etnik Yahudi di AS. Oleh karena itu bisa dipahami pula, jika Mesir dalam kebijakannya didominasi kepentingan AS. Dan hal ini mengakibatkan ketergantungan Mesir kepada Amerika baik secara ekonomi

maupun militer. Sebagaimana yang dipaparkan para ahli teori ketergantungan seperti Prebisch, Furado dan Sunkel bahwa;

*“berabad-abad lamanya negara-negara dominan telah mencampuri urusan-urusan internal negara-negara lain. Dalam kasus Amerika Serikat selama abad 19 dan 20, intervensi terjadi lewat kemajuan-kemajuan Amerika Serikat dalam mewujudkan langkahnya. Pembentukan institusi-institusi keuangan internasional membantu menyakinkan hegemoni negara-negara dominan atas negara-negara dependen (tergantung), dan pembentukan program-program bantuan seperti Alliance for Progress bertindak sebagai penyamar strategi-stretegi lama dalam melayani kapitalisme Amerika Serikat. Amerika Serikat bertindak sebagai pihak yang diuntungkan dengan mengangkat dunia terbelakang dan menyebarkan peradaban dimana-mana.”*

Sementara itu kondisi sosial dan ekonomi dalam negeri Mesirpun tidak membaik, malahan kian memburuk. Kelompok-kelompok radikal mulai bermunculan dan memaksa Sadat menempuh garis keras dengan jalan penangkapan besar-besaran terhadap gerakan yang menentang pemerintah. Ironis sekali, Sadat terbunuh pada upacara kemiliteran peringatan Perang 1967 (6 Oktober 1981) yang memantapkan kepemimpinannya di Mesir sesudah Nasser.

Sejak itu Mesir diperintah oleh Anwar Sadat yang merupakan presiden Republik Arab Mesir. Anwar Sadat terkenal sebagai pendukung penuh kebijaksanaan politik Sadat, termasuk pelaksanaan politik luar negerinya dan khususnya usaha Sadat mengakhiri berlarutnya masa ‘no war, no peace’ dengan Israel. Sekalipun perannya tidak terlalu menonjol, Hosni Mubarak mendukung usaha Sadat untuk menyelesaikan sengketa Arab-Israel melalui jalan perundingan, yang akhirnya dilaksanakan Mesir berdasarkan perjanjian *Camp David*. Sadat tidak merisaukan terjadinya keretakan hubungan dengan negara-negara Arab lain yang menentang Camp David. Sadat berpendapat bahwa negara-negara Arab tidak mungkin berlama-lama mengucilkan Mesir. Anawar Sadat berpendapat bahwa Mesir tetap diharapkan menjalankan peran aktif bukan saja dalam usaha penyelesaian sengketa Arab-Israel, melainkan terlebih lagi dalam penyelesaian permasalahan antar-Arab.

Namun demikian Sadat menyadari, identifikasinya dengan kebijaksanaan politik luar negeri yang telah dilakukan, khususnya dukungannya terhadap persetujuan *Camp David*, tidak memudahkan baginya untuk selekasnya melakukan pendekatan terhadap negara-negara Arab guna memperbaiki hubungannya dengan Mesir (Sihbudi, 1979:28).

Sementara itu Israel mengakui peran Mesir dan hubungan Mesir –Israel semakin dekat. Hal ini bisa dilihat volume kunjungan para pejabat Israel ke Mesir yang semakin meningkat, mulai PM Ehud Barak, Pejabat Menlu Shlomo Ben Ami, hingga ketua Partai Meretz, Yossi Sarid. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden Anwar Sadat sejak lama menjadi pelayan Amerika Serikat, juga kerap melayani kepentingan Israel. Sejak 28 Desember 1979 hingga 17 Januari 1978, masyarakat dunia, khususnya masyarakat Mesir yang menjadi tetangga dekat Gaza, mengutuk genosida Israel terhadap warga Gaza. Tapi pemerintah Mesir malah bertindak refresif terhadap warganya yang berdemonstrasi sebagai aksi solidaritas terhadap warga Gaza (Sihbudi, 1979:44).

Misalnya saja, Pintu gerbang Rafah adalah satu-satunya ‘jalan keluar’ bagi sisa warga Gaza untuk bisa mengungsi dan menyelamatkan diri dari rudal-rudal dan senjata pemusnah masal militer Israel lainnya. Meski rakyat Mesir dan hampir masyarakat seluruh Dunia turun ke jalan meminta Anwar Sadat membuka pintu Gerbang Rafah, tapi Presiden yang memerintah lebih dari seperempat abad itu malah memerintahkan agar pintu itu ditutup rapat dan diawasi secara ketat. Bukan hanya itu ketua Ikatan Dokter Arab di Kairo menyatakan bahwa Anwar Sadat tegas menolak mengizinkan tim dokter dan relawan lainnya memasuki wilayah Jalur Gaza. Pemerintah Mesir bersikukuh menutup Rafah sampai Israel menyelesaikan “hajatnya”, meski dunia internasional, Arab dan Islam mendesak segera membukanya.”

Pada 8 Januari 1979, secara resmi pemerintah Mesir menyarankan genjatan senjata. Mesir menyarankan korban pembantaian (Palestina) dengan pihak pembantai (Israel). Pemerintah Mesir hanya menekankan genjatan senjata dan perdamaian, namun tidak membedakan pihak agresor dan pihak

korban, mengaburkan persoalan sebenarnya. Dan pada hari keenambelas berlangsungnya genosida di Gaza yang meluhlantakan pemukiman warga, semua lapisan penduduk Mesir meminta Anwar Sadat memihak Palestina, tapi sang ‘diktator’ itu tetap ‘tutup mata dan tutup telinga’. Setelah tidak membuka pintu Rafah, satu-satunya pintu masuk agar bantuan medis bisa diterima warga Gaza. Anwar Sadat mengizinkan jet-jet tempur Israel memuntahkan rudal-rudalnya dari udara Mesir untuk membumihanguskan sisa pemukiman warga Gaza.

Disisi lain perjanjian Camp David membawa dampak positif bagi perekonomian Mesir, banyak wisatawan dari Israel yang mengunjungi Mesir sehingga perputaran ekonomi disektor wisata berkembang sangat pesat. Bantuan yang di terima Mesir dari Amerika Serikat juga sangat membantu dalam pembangunan infrastruktur. Jumlah bantuan yang diterima Mesir untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan dari tahun 1974 sampai tahun 1984 berjumlah \$ 7.301.100.000 (Rahman 2012:14).

### **5.3 Dampak Perjanjian Camp David Terhadap Hubungan Mesir dengan Negara-Negara Arab**

Perjanjian Camp David yang ditandatangani pada tanggal 17 September 1978 oleh Mesir dan Israel telah merubah peta geopolitik ditimur tengah. Perjanjian Camp David merupakan titik awal perpecahan dunia Arab. Mesir melakukan perjanjian Camp David untuk mengakhiri peperangan dengan Israel yang sudah terjadi sejak 30 tahun yang lalu, akibat dari peperangan dengan Israel kondisi perekonomian Mesir mulai memburuk.

Sebenarnya krisis ekonomi yang dialami Mesir sudah terjadi sejak masa pemerintahan Nasser yang kemudian diwariskan pada masa Anwar Sadat. Sadat beranggapan bahwa Nasser saat menjabat sebagai presiden Mesir terlalu sibuk memikirkan masalah Palestina sehingga masalah dalam negeri terabaikan. Nasser juga terlalu menjaga martabatnya sebagai salah satu tokoh pemimpin dunia Arab, hal tersebut menjadi penyebab Mesir mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada masa pemerintahan Nasser, Mesir menjadi negara yang

mengambil peran besar dalam masalah Palestina dan perpolitikan di Timur Tengah. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Nasser untuk melangkah mundur dalam perang melawan Israel, karena akan mempengaruhi reputasi Mesir dimata negara-negara Arab.

Dalam mengatasi masalah krisis moneter di Mesir, Anwar Sadat menerapkan kebijakan *Infitah* (pintu terbuka). Pada Tahun 1974 diterapkan kebijakan *infitah* dan membuka pintu bagi investasi asing. Kebijakan baru ini sejalan dengan persekutuan Anwar Sadat dengan Amerika Serikat dan negara-negara Arab konservatif. Meski banyak tergantung pada investasi asing, namun kesejahteraan rakyat terus-menerus bergantung pada ekspor minyak, pada sektor pariwisata, bea terusan Suez, dan kiriman uang para pekerja di luar negeri. Demikianlah, hutang Mesir luar negeri Mesir berkembang semangkin besar.

Namun demikian, yang menjadi tantangan utama bagi pemerintahan Mesir ialah pembangunan ekonomi dalam negeri. Sebab sekalipun sudah mendapat sumber bantuan baru dari luar negeri dan pemutihan hutang luar negerinya, Mesir masih harus berusaha untuk mencapai secepatnya tahap lepas landas bagi pertumbuhan prekonomian, dengan memperlancar masuknya modal asing serta mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pendukung proses industrialisasi.

Perjanjian Camp David dilakukan Mesir karena dianggap sebagai jalan pintas untuk memperbaiki krisis ekonomi Mesir. Anwar Sadat tidak menyadari akan dampak yang diberikan oleh Perjanjian Camp David. Perjanjian Camp David tidak hanya berdampak bagi Mesir saja bahkan dunia Arab juga merasakan dampak yang berkepanjangan hingga saat ini.

Selepas terlaksananya perjanjian Camp David kondisi politik luar negeri Mesir berubah sepenuhnya. Mesir dikeluarkan dari Liga Arab, dan Markas Pusat Liga Arab dipindahkan dari Kairo ke Tunis. Berbagai sumber bantuan dari negara-negara Arab dihentikan dan Mesir mulai terkucilkan dari dunia Arab. Mesir dianggap telah melakukan perjanjian damai tersendiri (*separate peace*) yang sangat bertentangan dengan kesepakatan antar negara Arab. Satu hal yang dikecam atas perjanjian tersebut terkait masalah Palestina yang dianggap tidak

diperhatikan dalam naskah perjanjian Camp David.

Pada bulan Desember 1977 terbentuk suatu kubu garis keras (*steadfastnessn front*) dalam suatu pertemuan tersendiri di Tripoli. Terbentuknya kubu tersebut untuk menentang perjanjian damai yang dilakukan Anwar Sadat. Kubu tersebut terdiri dari Libya, Aljazair, Syria, Yaman Selatan, dan PLO. Maka semakin sempit ruang gerak Mesir selepas perjanjian Camp David. Sangat ironi sekali, negara yang dulunya menjadi pemimpin dunia Arab kini dimusuhi oleh sebagian besar Negara Arab.

Perjanjian yang dilakukan Mesir dengan Israel dianggap sebagai penghianatan terhadap negara-negara Arab. Negara-negara Arab yang pada waktu itu masih berpegang pada semboyan “*no recognition, no negotiation, no peace*” terhadap Israel, maka sangat wajar apabila Negara-negara Arab sangat geram dengan jalan yang dipilih Mesir.

Uni Soviet mengatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan bentuk perwujudan politik imperialismenya Amerika Serikat ke Timur Tengah dan merupakan usaha untuk memutuskan persahabatan antara Uni Soviet dan dunia Arab. Syria lebih lanjut mengatakan bahwa perjanjian tersebut bisa meningkatkan ketegangan di dunia Arab dan jika terjadi perang maka hal itu akan mengarah menuju perang dunia III. Sementara dari pemerintahan Arab Saudi sendiri menganggap bahwa perjanjian tersebut mengkhianati umat muslim Palestina, yang berarti mengakui keberadaan Israel di Palestina, karena seharusnya Israel menarik diri dari Palestina seluruhnya. Sementara raja Husein dari Yordania menanggapi perjanjian tersebut dengan merasa terkhanati oleh AS yang sepertinya telah menyalahi atau menyakiti hati orang Arab (World Reaction, 1979: 26).

Perdamaian Sadat dengan Israel mengundang perlawanan sengit negara-negara Arab baik dari dalam negeri Mesir itu sendiri maupun dari negara-negara Arab, terutama Yordania, Syria, Iraq dan Lebanon, yang tidak menerima yang mereka sebut “perdamaian terpisah” itu dengan Israel. Perlawanan negara-negara Arab mencapai puncak dalam Konferensi Baghdad pada 2-5 November 1978. Konferensi ini membuat isolasi Mesir dari negara-

negara Arab. Hal ini sudah diperhitungkan Sadat sebelumnya, namun Sadat berkeyakinan bahwa negara-negara tersebut tidak bisa terlalu lama menjauhi Mesir. Sadat sangat sadar bahwa Mesir tergolong negara Arab yang berperan penting sebagai salah satu aktor politik berpengaruh terhadap perkembangan situasi di Timur Tenga khususnya yang berkaitan dengan usaha penyelesaian sengketa Arab-Israel (Rahman, 2002:174)

Semenjak dilakukannya perjanjian Camp David hubungan Mesir dengan negara-negara Arab semakin memburuk. Sumber bantuan yang sedianya diterima dari beberapa negara *petro-dollar* Arab telah dibekukan. Sementara itu, kondisi sosial dan ekonomi dalam negeri Mesir tidak kunjung membaik, malah semakin memburuk. Kelompok-kelompok radikal mulai bermunculan yang semuanya menyuarakan ketidak puasan atas Perjanjian Camp David. Masyarakat Mesir merasa kecewa dengan keputusan yang diambil Anwar Sadat.

Pada parade kemiliteran 6 Oktober 1981 untuk memperingati perang 1967 Anwar Sadat tewas terbunuh. Sampai saat ini tidak ada yang tahu motif pembunuhan Anwar Sadat. Apakah Anwar Sadat terbunuh karena perjanjian damai Mesir dengan Israel atau karena krisis ekonomi Mesir yang tak kunjung membaik, tetapi yang pasti betapapun menguntungkannya perjanjian Camp David bagi Mesir telah membawa Anwar Sadat dalam kondisi yang sangat sulit. Beberapa hari setelah terbunuhnya Anwar Sadat, wakil presiden Husni Mubarak dikukuhkan sebagai presiden Mesir. Meskipun banyak yang menilai buruk keputusan yang diambil Anwar Sadat dengan menandatangani perjanjian Camp David, namun satu hal yang harus diakui bahwa Anwar Sadat telah berhasil mengembalikan wilayah teritorial Mesir (Semenanjung Sinai) yang tadinya dikuasai Israel (Sihbudi,1995:161).

### **5.3.1 Hubungan Mesir dan Arab Saudi**

Tahun 1950-an dan 1960-an merupakan tahun dimana terjadi gejolak politik yang serius di Timur Tengah. Di luar dua perang besar dengan Israel, negara-negara Arab menyaksikan jatuhnya beberapa monarki yang sudah berkuasa sangat lama. Tahun 1952 kudeta militer yang menggulingkan Raja

Farouk di Mesir adalah peristiwa besar, karena menginspirasi kudeta militer berikutnya di Irak, Sudan, Libya, dan Aljazair. Pidato kuat Presiden Gamal Abdel Nasser dan karisma ditingkatkan narasi sejarah dan politik, yang menekankan identitas Arab, persatuan, dan menentang kekuasaan kolonial. Ini bergaung luas di seluruh wilayah, termasuk di Arab Saudi (Amstrong, 2004:54).

Selama kunjungannya ke Arab Saudi pada tahun 1956, dia disambut oleh kerumunan antusias. Namun, mereka Presiden Nasser dari politik revolusioner, yang menantang tatanan politik di Timur Tengah, di samping ekonomi quasi-sosialisnya, kontras dengan postur konservatif Arab Saudi yang disukai mencari akomodasi lebih konfrontasi. Presiden Nasser digambarkan kebijakan Saudi sebagai bentuk kapitulasi yang dikompromikan kepentingan dan “martabat” orang-orang Arab. Raja Saud, yang mengambil tahta Arab Saudi setelah ayahnya meninggal pada tahun 1953, awalnya mencoba untuk mengakomodasi Presiden Nasser mengingat gelombang popularitas ia menikmati setelah kemenangannya dianggap melawan “Invasi Tripartit” oleh Inggris, Perancis, dan Israel di 1956 konflik Suez. Namun, kesenjangan ideologi itu cukup dalam bahwa hubungan antara kedua negara menjadi sangat menegangkan bagi banyak dari sisa pemerintahan Presiden Nasser sampai kematiannya pada 1970.

Perbedaan ideologis dan filosofis yang mendalam ini paling jelas dalam Perang Saudara Yaman Utara yang dimulai pada tahun 1962. Arab Saudi dan Mesir berada di sisi berlawanan dari perang berdarah ini yang berlangsung hingga 1970. Arab Saudi dianggap perang Yaman menjadi saat yang menentukan dalam menghadapi apa yang tampak seperti gelombang tak tertahankan republikanisme menyapu kawasan itu, banyak yang terinspirasi atau secara aktif didukung oleh Presiden Nasser. Karena thousandmile perbatasan dan dekat hubungan mereka dengan banyak pemangku kepentingan Yaman -termasuk para pemimpin politik dan suku- Yaman telah lama menjadi “garis merah” bagi para pemimpin Arab. Oleh karena itu, Arab Saudi memiliki selalu ditarik ke dalam banyak konflik Yaman.

Selama tiga tahun pertama perang, Arab Saudi memberikan dukungan keuangan dan senjata untuk Muhammad al-Badr dan faksi royalis, yang

digulingkan oleh, kudeta militer Mesir terinspirasi, dan akhirnya didukung (Findley, 1995:73). Namun, konflik masih mencerminkan preferensi Saudi untuk kebijakan hati-hati. kemampuan militer terbatas kerajaan pada saat itu memastikan bahwa pasukan Saudi tidak menjadi terlibat langsung dalam pertempuran itu. Namun, Presiden Nasser berkomitmen untuk “revolusioner” kudeta, dan pada tahun 1965 Mesir telah melakukan 70.000 tentara konflik. Diperkirakan 10.000 dari mereka meninggal selama pertempuran. Oleh sebagian besar account, petualangan Presiden Nasser di Yaman Utara melemahkan sumber daya Mesir, dan banyak sejarawan berpendapat bahwa ini lebih-komitmen memainkan peran utama dalam kemenangan Israel dalam perang dengan Mesir pada tahun 1967.

Setelah awalnya mendukung Presiden Nasser, dalam ukuran besar karena ia masih dilihat raja-raja Hashemite di Yordania dan Irak sebagai musuh utama Arab Saudi, Raja Saud segera berubah saja. Dia mulai melihat Presiden Nasser dan politik revolusioner sebagai lebih merupakan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas kerajaan, terutama karena beberapa elemen dalam militer Saudi, dan ekspatriat Arab bekerja ladang minyak di Provinsi Timur, menjadi terlibat dalam berbagai konspirasi untuk menggulingkan pemerintah. Perbedaan politik antara Presiden Nasser dan Raja Saud akhirnya menjadi pribadi, namun kombinasi dari kesalahan manajemen keuangan dan kesulitan menyesuaikan diri dengan lanskap politik yang berubah menyebabkan pengganti Saud sebagai raja oleh adiknya, Faisal (Sihbudi, 1991:28).

Raja Faisal telah melakukan perjalanan secara ekstensif pada usia yang sangat muda dan mengembangkan apresiasi untuk urusan luar negeri. Putranya, Saud, menjabat sebagai menteri luar negeri Arab Saudi selama 40 tahun. Bersama-sama mereka memainkan peran utama dalam membuat keterlibatan, pragmatisme, dan diplomasi tenang adalah keunggulan dari kebijakan luar negeri Saudi. Sementara Presiden Nasser diberitakan persatuan Arab dan transformasi radikal dari tatanan regional, Raja Faisal menyadari bahwa, sebagai tempat kelahiran Islam dan lokasi situs tersucinya - Mekkah dan Madinah - Arab Saudi secara unik untuk mengambil posisi kepemimpinan dalam Islam dunia.

Menekankan pentingnya identitas Muslim, sebagai lawan nasionalisme Arab sekuler Presiden Nasser, Arab Saudi membangun sebuah narasi alternatif konservatif untuk bertindak sebagai penyeimbang. Ini “*Pan-Islam*” narasi ditinggikan Status regional dan bahkan global yang Arab Saudi.

Dalam usahanya untuk menumbuhkan solidaritas antara negara-negara mayoritas Muslim, Raja Faisal menciptakan Liga Muslim Dunia pada tahun 1962 dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1969. Sementara mantan terfokus pada kegiatan budaya dan amal, yang terakhir menjadi forum di mana negara-negara mayoritas Muslim bisa mengembangkan pendekatan yang lebih seragam untuk tantangan politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun Mesir adalah anggota pendiri dari OKI tersebut, Presiden Nasser sangat menyadari pan-Islam banding ini, dan potensinya sebagai alternatif untuk nasionalisme Arab sendiri. Dia juga mengerti bahwa Arab Saudi akan menjadi pemimpin yang paling logis dan bahwa ia tidak bisa bersaing di bidang permainan (Sihbudi, 2007:41).

### **5.3.2 Hubungan Mesir dan Libya**

Setelah Mesir dan Libya merdeka pada tahun 1950-an, kedua negara masing-masing mempertahankan hubungan yang saling koperasi. Berkaitan dengan kebijakan luar negeri dan keamanan regional, kedua negara tetangga dilihat sama lain sebagai pemain kunci. Ketika Gaddafi berkuasa pada tahun 1969, tujuan awal mengenai Mesir adalah untuk mencoba dan menciptakan kemitraan dengan Mesir baik di dalam kawasan dan di komunitas Pan-Arab yang lebih luas. Sayangnya untuk Gaddafi, ia akan membuktikan lebih didedikasikan untuk mempromosikan golnya dari baik Nasser atau penggantinya Sadat. Kemudian, ketegangan muncul karena rekonsiliasi Mesir dengan barat dan akhirnya pada pertengahan tahun 1970, Mesir telah menjadi musuh terbesar Libya. Tiga event yang mengatur latar belakang untuk hubungan yang modern antara Libya dan Mesir: perang Arab-Israel tahun 1973 dan sesudahnya, 1977 Libya-Mesir bentrokan perbatasan dan 1992 sanksi terhadap Libya dan bentrokan yang sedang berlangsung saat ini mengamankan perbatasan Libya. Para ahli menyarankan bahwa mantan acara sangat penting karena diendapkan rincian antara Libya dan

Mesir. Artikel ini akan berusaha untuk memberikan wawasan ke dalam hubungan Libya-Mesir kritis (Findley, 1995:65).

Pada tahun 1969, kudeta militer membawa rezim baru berkuasa di Sudan dan Libya. Para pemimpin baru, Ja'far an-Numeiri dan Mu'ammarr al-Gaddafi bersama dengan Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser Hussein, bertemu pada bulan Desember tahun 1969 di Tripoli. Pada tanggal 27 Desember tahun bahwa "Tripoli piagam" diterbitkan yang menjadi dasar kerjasama antara Mesir, Sudan dan Libya. Meskipun kematian Nasser pada bulan September 1970, partisipasi Mesir dalam pembicaraan persatuan terus di bawah pengganti Nasser, Anwar Sadat. Gaddafi pindah untuk menganggap mantel Nasser sebagai pemimpin ideologi nasionalisme Arab dan atas permintaan kepala baru negara, General Hafiz al Assad, pembicaraan persatuan diperluas untuk mencakup Suriah. Pada saat Numeiri memiliki "sementara" ditarik keluar dari pembicaraan dan tiga kepala negara Libya, Mesir dan Suriah melanjutkan dan menandatangani rancangan konstitusi pada bulan Agustus yang sangat disetujui dalam referendum di ketiga negara (Huntington, 2001:74). Tripoli charter memuncak menjadi diundangkannya federasi republik Arab pada tanggal 2 September 1971. Kesepakatan itu dilihat sebagai langkah besar menuju persatuan Arab yang lebih besar.

Sadat bernama presiden pertama dari dewan kepala negara yang menjadi badan untuk Federasi Republik Arab (FAR). FAR resmi muncul di atas kertas pada 1 Januari, 1972. rencana Luas disusun untuk menyediakan penggabungan penuh yang mempengaruhi sistem hukum, hukum, ketenagakerjaan, angkatan bersenjata, dan kebijakan luar negeri dari ketiga negara. Untuk Gaddafi, FAR merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan utamanya: "Bangsa Arab" serikat komprehensif dari puas, Gaddafi memulai pembicaraan dengan Sadat untuk serikat politik penuh antara Mesir dan Libya, yang akan menggabungkan negara-negara tetangga menjadi satu negara dalam kerangka FAR. Pada saat itu, penduduk Mesir adalah 34 juta sedangkan penduduk di Libya berada di bawah 2 juta. Namun, pendapatan per kapita tahunan Libya adalah empat belas kali lipat dari Mesir. cadangan fiskal pada tahun 1972 diperkirakan mencapai lebih dari

setara US \$ 2,5 miliar, setidaknya sepuluh kali jumlah yang dimiliki oleh Mesir (Husein, 1995:91).

Gaddafi mulai menggunakan pendapatan minyak untuk membangun angkatan bersenjata Libya, pembelian jet Mirage III dan peralatan lainnya dari Perancis. Banyak pejuang dipindahkan ke Mesir di mana pilot Mesir pelatihan dalam persiapan untuk serangan baru terhadap Israel untuk memulihkan wilayah yang hilang dalam Perang Enam Hari tahun 1967. Gaddafi membayangkan kombinasi kekayaan Libya dan tenaga kerja dan militer kapasitas Mesir sebagai komponen kunci bagi keberhasilan perjuangan Arab terhadap Israel. Namun, dalam waktu hambatan untuk merger muncul, terutama perselisihan antara kedua pemimpin selama skala waktu untuk serikat. Gaddafi menyerukan unifikasi segera, sedangkan Sadat bersikeras integrasi langkah demi langkah dan persiapan yang matang dari serikat. Pada bulan Juli 1973, Gaddafi menyelenggarakan 40,000 march Libya pada Kairo untuk lebih menekan Mesir ke bertindak lebih cepat, namun pawai berubah kembali sekitar 200 mil dari Kairo. Meskipun demikian kesepakatan ditandatangani pada 29 Agustus. Pada tanggal 1 September 1973, merger ditetapkan untuk tindakan akhir. Namun, tanggal lulus dengan hampir tidak ada pemberitahuan di Kairo, banyak orang Mesir dan Libya telah menjadi resisten terhadap proyek. Sebagai contoh, beberapa orang Mesir merasa bahwa merger akan memberikan Gaddafi kontrol yang berlebihan atas nasib Mesir (Husein, 1995:103).

Serikat gagal sementara federasi menjadi semakin kurang signifikan. Sementara itu Mesir dan Suriah telah terus ditarik lebih dekat satu sama lain, tumbuh semakin jauh. Misalnya, mereka gagal untuk memasukkan Libya dalam rencana mereka untuk 1973 perang melawan Israel, yang kemudian dikenal sebagai perang Yom Kippur. Meskipun keberhasilan awal, Israel cepat pindah dari pertahanan untuk menyerang sebagai Gaddafi mengecam metode Mesir dan Suriah dalam perang. Gaddafi adalah lebih terkejut ketika Sadat setuju untuk gencatan senjata setelah balasan Israel yang sukses. Gaddafi merasa semakin sulit untuk menyembunyikan ketidaksetujuannya untuk apa yang dilihatnya sebagai manajemen bersemangat Sadat perang. Setelah Perang Yom Kippur, hubungan

antara kedua pemimpin lanjut merosot. Sadat diresmikan sikap pro-Barat termasuk kebijakan akomodasi dengan pemerintah Israel, dalam pertukaran untuk kembalinya Sinai dengan ladang minyak dan untuk jumlah besar bantuan. Gaddafi dan para pemimpin negara Arab lainnya dilihat perundingan perdamaian Sadat dengan Israel tidak dapat diterima dan pengkhianatan yang jelas dari dunia Arab (Sihbudi, dkk., 1995:36).

Hubungan antara Mesir dan Libya terus menurun sepanjang 1974 dan 1975 sebagai Sadat secara terbuka mengkritik Gaddafi yang telah mengancam untuk mengambil tindakan terhadap pekerja Mesir di Libya. Dengan saling tuduhan yang dilemparkan di kedua arah, permusuhan antara Libya dan Mesir mencapai titik tinggi pada April-Mei 1977, ketika para demonstran di kedua negara menyerang konsulat masing-masing. Gaddafi menuduh Mesir memprovokasi perang sehingga bisa merebut ladang minyak Libya. Pada bulan Juni 1977, Gaddafi memerintahkan 225.000 orang Mesir yang bekerja dan tinggal di Libya baik meninggalkan negara atau wajah penangkapan. Pada tanggal 21 Juli 1977, tembak-menembak mulai oleh pasukan di sepanjang perbatasan Libya-Mesir. Hal ini diikuti oleh serangan di desa Sallum dilakukan oleh pasukan Libya. Sebuah perang empat hari mulai di mana kedua belah pihak digunakan tank dan pesawat terbang dalam beberapa pertempuran di sepanjang perbatasan padang pasir. Sadat telah memerintahkan tiga divisi untuk berangkat ke perbatasan Libya ketika ia dibuat sadar akan kemajuan tank Libya. Tiga divisi memukul mundur pasukan pemadam Libya sebagai jumlah pesawat Libya dan peralatan hancur di tanah selama serangan Mesir. Selain itu, tentara Mesir menyerbu seberang perbatasan Libya dan berhasil menangkap beberapa kota-kota perbatasan kunci. Akhirnya, Presiden Aljazair, Houari Boumediene, dan Yasser Arafat, campur tangan sebagai mediator dan kedua belah pihak sepakat untuk gencatan senjata pada 24 Juli, 1977. Meskipun demikian, kedua negara menderita kerugian manusia dan material. Meskipun pertempuran akan segera berakhir, keretakan antara kedua negara tetap. Negara-negara Arab konservatif bersimpati dengan Mesir, sedangkan negara-negara Arab pro-Soviet bersimpati dengan Libya. Kemudian pada bulan November 1977, Sadat mengunjungi Israel sebagai Gaddafi

bergabung dengan sisa dunia Arab di menegakan perjanjian damai Mesir-Israel yang dibentuk pada Maret 1979. Setahun kemudian, Libya dibangun lapangan terbang dan benteng di perbatasan dengan Mesir dan pada bulan Juni 1980 Mesir mengumumkan darurat militer di daerah perbatasan dengan Libya. Pada tahun 1981, Sadat dibunuh pada parade militer di Kairo dan digantikan oleh Hosni Mubarak.

Di bawah Mubarak, hubungan Mesir dengan Libya mulai terus membaik. Dari tahun 1989, Mesir berusaha untuk kembali menormalkan-hubungan dengan dunia Arab. Sementara itu, Libya sepakat untuk membuka kembali pasar tenaga kerja untuk pekerja Mesir. Pada Juli 1998, Mubarak diduga terbang ke Libya untuk bertemu dengan Gaddafi, yang pulih dari operasi pinggul. Pada bulan Juli 2000, baik Libya dan Mesir sepakat untuk bekerja dengan Carter Center yang berbasis di Atlanta untuk membantu mendamaikan konflik antara Sudan dan Uganda. Setelah “rapat pleno” antara kepala negara dari kedua negara pada tahun 2001, Komite lebih tinggi Mesir-Libya bersama diciptakan. Hal ini mengakibatkan penandatanganan hampir selusin “perjanjian, program eksekutif dan protokol pada kerjasama dalam komersial, bidang ekonomi dan investasi”.

Tanggal 25 Januari 2011, terkenal disebut sebagai “Hari Kemarahan”, memicu 18 hari protes umum massal di seluruh Mesir, akhirnya memaksa pengunduran diri Mubarak. Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) mengambil alih kekuasaan sampai pemilu diadakan pada bulan Juni 2012, yang membawa Mohammed Morsi dari Ikhwanul Muslimin sebagai Presiden. Namun, segera setelah protes dilanjutkan pada bulan Juni 2013 sebagai publik ditekan sekali lagi untuk perubahan rezim. Militer bertindak untuk menstabilkan situasi dan dihapus Morsi dari pemerintah, menyerukan sekali lagi untuk pemilu dan untuk rancangan konstitusi baru. Dalam pemilu Mei 2014, Abdel Fattah Al-Sisi memenangkan kursi kepresidenan. Mesir pergi ke arah pemerintahan yang didominasi militer sekuler. Di Libya, pemberontakan rakyat terhadap Gaddafi mulai Februari 2011 di Benghazi setelah bentrokan meningkat di Benghazi dan Tripoli. Pada Oktober 2011, Gaddafi ditangkap dan dibunuh dan The Libya Dewan Transisi Nasional (NTC) menyatakan pemerintahannya di atas Libya.

Setelah 'Musim Semi Arab', hubungan antara Mesir dan Libya memasuki fase bergejolak sebagai sengketa yang terkait dengan keamanan dan kemampuan masing-masing negara, atau lebih tepatnya ketidakmampuan, untuk mengendalikan operasi teroris meningkat. Musim panas tahun 2014 melihat negara terfragmentasi Libya turun ke perang saudara lain karena banyak kelompok berjuang untuk kontrol atas berbagai daerah negara. Mesir telah dipengaruhi oleh ketidakstabilan ketidakstabilan ini Libya. Mesir telah menjadi jalur untuk perdagangan senjata antara kelompok Islamis Libya dan kelompok Salafi-Jihadis yang beroperasi di Sinai. Gaddafi ditangkap dan dibunuh dan The Libya Dewan Transisi Nasional (NTC) menyatakan pemerintahannya di atas Libya. Setelah 'Musim Semi Arab', hubungan antara Mesir dan Libya memasuki fase bergejolak sebagai sengketa yang terkait dengan keamanan dan kemampuan masing-masing negara, atau lebih tepatnya ketidakmampuan, untuk mengendalikan operasi teroris meningkat. Musim panas tahun 2014 melihat negara terfragmentasi Libya turun ke perang saudara lain karena banyak kelompok berjuang untuk kontrol atas berbagai daerah negara. Mesir telah dipengaruhi oleh ketidakstabilan ketidakstabilan ini Libya. Mesir telah menjadi jalur untuk perdagangan senjata antara kelompok Islamis Libya dan kelompok Salafi-Jihadis yang beroperasi di Sinai. Gaddafi ditangkap dan dibunuh dan The Libya Dewan Transisi Nasional (NTC) menyatakan pemerintahannya di atas Libya.

Setelah 'Musim Semi Arab', hubungan antara Mesir dan Libya memasuki fase bergejolak sebagai sengketa yang terkait dengan keamanan dan kemampuan masing-masing negara, atau lebih tepatnya ketidakmampuan, untuk mengendalikan operasi teroris meningkat. Musim panas tahun 2014 melihat negara terfragmentasi Libya turun ke perang saudara lain karena banyak kelompok berjuang untuk kontrol atas berbagai daerah negara. Mesir telah dipengaruhi oleh ketidakstabilan ketidakstabilan ini Libya. Mesir telah menjadi jalur untuk perdagangan senjata antara kelompok Islamis Libya dan kelompok Salafi-Jihadis yang beroperasi di Sinai. hubungan antara Mesir dan Libya memasuki fase bergejolak sebagai sengketa yang terkait dengan keamanan dan

kemampuan masing-masing negara, atau lebih tepatnya ketidakmampuan, untuk mengendalikan operasi teroris meningkat. Musim panas tahun 2014 melihat negara terfragmentasi Libya turun ke perang saudara lain karena banyak kelompok berjuang untuk kontrol atas berbagai daerah negara. Mesir telah dipengaruhi oleh ketidakstabilan ketidakstabilan ini Libya. Mesir telah menjadi jalur untuk perdagangan senjata antara kelompok Islamis Libya dan kelompok Salafi-Jihadis yang beroperasi di Sinai. hubungan antara Mesir dan Libya memasuki fase bergejolak sebagai sengketa yang terkait dengan keamanan dan kemampuan masing-masing negara, atau lebih tepatnya ketidakmampuan, untuk mengendalikan operasi teroris meningkat. Musim panas tahun 2014 melihat negara terfragmentasi Libya turun ke perang saudara lain karena banyak kelompok berjuang untuk kontrol atas berbagai daerah negara. Mesir telah dipengaruhi oleh ketidakstabilan ketidakstabilan ini Libya. Mesir telah menjadi jalur untuk perdagangan senjata antara kelompok Islamis Libya dan kelompok Salafi-Jihadis yang beroperasi di Sinai. Mesir telah dipengaruhi oleh ketidakstabilan ketidakstabilan ini Libya. Mesir telah menjadi jalur untuk perdagangan senjata antara kelompok Islamis Libya dan kelompok Salafi-Jihadis yang beroperasi di Sinai. Mesir telah dipengaruhi oleh ketidakstabilan ketidakstabilan ini Libya. Mesir telah menjadi jalur untuk perdagangan senjata antara kelompok Islamis Libya dan kelompok Salafi-Jihadis yang beroperasi di Sinai.

Setelah puluhan tahun hubungan kontroversial, para ahli memperkirakan bahwa dengan jatuhnya Mubarak dan Gaddafi, hubungan antara Libya dan Mesir berpotensi menjadi lebih dekat. Namun, seperti tahun-tahun telah berlalu, ini membuktikan sebaliknya. realitas politik dan perbedaan ideologi telah menyebabkan hubungan perdebatan terus menerus antara kedua negara tetangga. Namun, munculnya Daesh dan kontrol perbatasan yang keropos bisa dilihat sebagai motif untuk kedua negara untuk bekerja sama. Sebuah vakum kesempatan ada untuk kedua Libya dan Mesir untuk bekerja sama untuk memecahkan ancaman bersama Daesh. Tugas bersama mengamankan mereka 700 mil perbatasan panjang serta peluang Mesir untuk investasi di Libya harus

menyediakan sarana melalui mana dua negara bisa datang bersama-sama dan membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

### 5.3.3 Hubungan Mesir dan Suriah

Berbeda dengan Libya atau Mesir yang dipimpin oleh individu yang berasal dari golongan mayoritas, Suriah dipimpin oleh golongan minoritas. Tentu ini membuat cara mengelola kekuasaan menjadi berbeda. Tindakan represif dengan kekerasan tetap menjadi siasat yang dilakukan oleh keluarga Al-Assad. Namun sebagai kelompok minoritas, keluarga Al-Assad juga berusaha untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, yang terlihat sangat pragmatis.

Sebagai bagian dari Dunia Arab, Suriah mempunyai peran dan posisi penting. Damaskus, pernah menjadi ibukota Dinasti Bani Umayyah dan menjadi salah satu pusat kebudayaan Arab. Damaskus menjadi salah satu tempat, bagi warga di luar Timur Tengah, sebagai tempat untuk belajar bahasa Arab. Ditambah lagi letak geografis yang berbatasan langsung dengan Israel, terutama dengan perebutan teritori Dataran Tinggi Golan yang diklaim oleh negara Yahudi tersebut. Ini adalah sebagian hal yang menyebabkan Suriah menjadi bagian penting di Dunia Arab, baik dari segi politik, keamanan, maupun budaya.

Seperti halnya Mesir dan Libya, Suriah mengalami kudeta militer dan bahkan sempat merasakan pemerintahan rezim militer selama kurang lebih tiga dekade. Kudeta militer pertama dilakukan oleh Kolonel Husni Zaim pada tahun 1949, dengan menggulingkan pemerintahan Presiden Shukri al-Quwwatli. Alasan yang digunakan oleh Zaim adalah, pemerintahan al-Quwwatli yang korup dan berimplikasi pada kekalahan pasukan Suriah pada saat perang melawan Israel pada tahun 1948. Namun Zaim sendiri pada akhirnya tidak dapat mempertahankan pemerintahannya. Perbedaan pendapat antara politikus dan kelompok militer dalam menjalankan roda pemerintahan, serta kekecewaan dari kelompok minoritas yang menginginkan porsi yang lebih besar di jabatan sipil maupun militer, membuat pemerintahan Zaim menjadi lemah. Ditambah lagi kalangan militer yang kecewa dengan Zaim, disaat jabatan kemiliteran didasarkan oleh kedekatan dengan sang komandan, bukan berdasarkan kemampuan. Semua

kejadian ini membuat pemerintahan Zaim berjalan dengan tidak efektif dan membuat kalangan militer berpendapat bahwa Zaim harus digulingkan.

Hanya dalam waktu empat setengah bulan, pemerintahan Kolonel Zaim berakhir. Kudeta yang dilakukan oleh Kolonel Sami Hinnawi berhasil menurunkan Zaim, namun Hinnawi sendiri tidak berlangsung lama, dia diturunkan oleh sebuah kudeta yang dilakukan oleh Kolonel Adib Shishakli pada tahun 1950. Shishakli memerintah Suriah dengan tangan besi. Segala bentuk perlawanan terhadap pemerintahnya diberangus. Pada tahun 1951 dia melarang partai politik, persatuan pelajar dan perkumpulan pekerja. Hanya ada satu organisasi politik yang diperbolehkan di Suriah, yaitu Gerakan Pembebasan Arab. Pola pemerintahan Shishakli pada akhirnya membuat seluruh rakyat Suriah muak dan melakukan pemberontakan. Dengan didukung oleh element angkatan bersenjata, Shishakli berhasil diturunkan dan pemerintahan Suriah sekali lagi berganti kepada pemerintahan sipil pada tahun 1954.

Pada masa pemerintahan sipil ini, partai-partai politik bermunculan. Salah satu yang terkuat adalah Partai Ba'ath yang didirikan oleh Michel Aflaq dan Salahudin al-Bittar. Sebagai partai yang mengusung gerakan sosialisme dan nasionalisme Arab, Partai Ba'th membuat banyak warga Suriah tertarik untuk bergabung. Salah satu yang bergabung adalah Hafiz al-Assad yang menjadi kader sejak masih dibangku sekolah menengah atas. Sebagai kelompok minoritas dari warga beragama Allawiyah (sebuah agama sempalan dari Islam Syiah), Hafiz al-Assad tertarik untuk bergabung dengan Partai Ba'ath karena partai tersebut mendukung sekularisme, dengan tidak membedakan agama. Hal ini yang membuat al-Assad tetap menjadi loyalis Partai Ba'ath meskipun dia menjadi anggota Angkatan Udara Suriah. Bahkan ketika dinamika politik Suriah yang tidak stabil pada medio 1960an, al-Assad membantu sebuah kudeta pada tahun 1963 yang berhasil menempatkan Ba'ath sebagai partai yang paling berkuasa di Suriah.

Sejak tahun 1963, Hafiz al-Assad menjadi salah satu orang terkuat dalam jajaran militer Suriah. Bahkan dia sempat menjadi Kepala Staf Angkatan Udara dan dekat dengan kekuasaan baik di jajaran partai maupun kepresidenan. Dengan

kekuatan politik yang dimilikinya ini al-Assad pada akhirnya mampu menyingkirkan bekas rekan-rekan seperjuangannya dari golongan Allawiyah seperti Salah al-Jadid dan dari Partai Ba'ath seperti Amin al-Hafiz. Pada tahun 1970, kudeta yang dilakukan Hafiz al-Assad berhasil menempatkan Jendral Angkatan Udara tersebut menjadi Presiden Suriah. Hal ini juga tidak lepas dari peran serta Anwar Sadat yang ikut andil dalam memberikan bantuan materil dan militer ke wilayah Suriah untuk menyelesaikan konflik internal dan membantu Mesir untuk menyelesaikan sengketa antara pihak Palestina dan Israel.

Hubungan Mesir dan Suriah hanya terbatas pada bantuan materil dan militer karena wilayah Suriah masih rawan dengan konflik internal, sedangkan wilayah Mesir sendiri posisi Anwar Sadat juga kurang stabil karena mendapatkan penolakan dari rakyatnya sendiri karena faktor melakukan perdamaian dengan pihak Israel tanpa melakukan persetujuan terlebih dahulu kepada pihak Palestina. Tetapi, Hubungan Mesir dan Suriah ini tetap berlanjut demi menjaga posisi Presiden Al-Assad tetap berada di tampuk kekuasaannya.

Sebagai presiden, Hafiz al-Assad memimpin Suriah layaknya seorang diktator, namun sebagai seorang dari golongan minoritas dia kadangkala harus melakukan kompromi agar tetap berkuasa. Ketika al-Assad berkuasa, pada tahun 1973, dia berusaha untuk merubah konstitusi Suriah. Kata-kata yang menyatakan bahwa presiden harus dijabat oleh seorang Muslim, sempat diusahakan untuk dihapus. Usaha ini mendapat tentangan luas dari warga Muslim, khususnya dari kalangan Sunni. Pada akhirnya al-Assad melakukan semacam kompromi, dengan membuat seorang ulama Syiah yang terpandang di Suriah mengeluarkan fatwa bahwa Allawiyah adalah bagian dari Islam Syiah. Tentu hal ini membuat sebagian warga Sunni tidak puas, akan tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun. Namun paling tidak dari segi agama, al-Assad berada dalam posisi yang relatif aman.

Dalam hal menjaga relasi dengan warga Muslim, terutama dari golongan Sunni, yang menjadi mayoritas di Suriah, al-Assad memainkan peran ekonomi dan politik. Kader Partai Ba'ath yang mayoritas dari warga Muslim, mendapatkan jatah yang besar di parlemen. Warga Muslim juga mendapatkan jatah di kursi pemerintahan, terutama sebagai anggota kabinet. Tentu saja mereka berasal dari

Partai Ba'ath. Sedangkan di sisi ekonomi, meskipun Partai Ba'ath berhaluan sosialis, Hafiz al-Assad memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi para pebisnis. Namun memang secara ideologis Partai Ba'ath tidak melarang sektor swasta, namun pemerintah harus menjadi aktor yang dominan dalam perekonomian. Bagi para pebisnis yang dekat dengan para petinggi Partai Ba'ath, atau pebisnis yang juga adalah kader partai, menjadi kalangan pebisnis yang berhasil. Praktek kolusi dan korupsi kerap mewarnai dunia bisnis di Suriah, namun ini penting bagi al-Assad untuk mempertahankan legitimasinya. Terutama banyak dari kalangan pebisnis ini adalah warga Muslim.

Sedangkan warga minoritas, yaitu warga Druze, Kristen dan tentu saja Allawiyah, mendapatkan jabatan di sektor keamanan. Untuk mengamankan posisinya di sektor keamanan, al-Assad membuat angkatan bersenjata, badan intelijen, dan kepolisian dikuasai oleh kelompok minoritas. Posisi-posisi penting di angkatan bersenjata dan dinas intelijen diisi oleh warga minoritas, terutama dari golongan Allawiyah. Bahkan al-Assad menunjuk adik kandungnya Rif'at al-Assad untuk memimpin pasukan elit yang dibentuk untuk menjaga rezimnya. Pasukan Rif'at al-Assad yang beranggotakan 55.000 orang berjasa dalam menjaga rezim kakaknya dengan berpartisipasi dalam mengalahkan pemberontakan Ikhwanul Muslimin di Hama pada tahun 1982. Namun pada akhirnya Rif'at yang sangat berambisi untuk berkuasa, berusaha untuk menggulingkan pemerintahan kakaknya. Pada bulan Maret 1984, Rif'at memimpin pasukannya ke Damaskus. Hafiz langsung menahannya dan pada akhirnya setelah menyadari bahwa dukungan Partai Ba'ath dan militer terhadap kakaknya sangat kuat, Rif'at mundur dan mengasingkan diri di Eropa.

Instrument kekuasaan al-Assad lainnya adalah *mukhabarat*, yaitu polisi rahasia yang bertugas untuk memata-matai dan menangkap warga yang melawan pemerintahannya. Mukhabarat tidak segan-segan dalam melakukan penangkapan terhadap para kelompok oposisi. Penyiksaan bahkan pembunuhan kerap dilakukan oleh anggota mukhabarat. Hal ini menunjukkan bahwa al-Assad juga melakukan cara-cara represif dalam menghadapi kelompok oposisi. Namun kondisi ini tidak membuat kelompok oposisi surut dalam melawan rezim diktator al-Assad. Pada

tahun 1982, anggota Ikhwanul Muslimin dan kelompok oposisi lainnya melakukan pemberontakan di kota Hama. Ikhwanul Muslimin (IM) sejak awal menentang pemerintahan Hafiz al-Assad yang berasal dari golongan Allawiyah. Sejak tahun 1976, anggota IM mulai melakukan pembunuhan terhadap politisi, serta pejabat militer maupun sipil yang berasal dari warga Allawiyah. Pemberontakan di Hama menjadi puncak pemberontakan IM. Respon al-Assad sangat cepat dan brutal. Kota tersebut dikepung selama dua bulan, sebelum diserang oleh pasukan angkatan darat Suriah. Pemberontakan tersebut dapat dipadamkan setelah tentara Suriah membunuh lebih dari 8.000 orang.

Hafiz al-Assad dapat mempertahankan kekuasaannya dengan melakukan manuver yang membuat aparatus kekuasaan Suriah mendukungnya. Warga Muslim dan kalangan sipil yang berpengaruh mendukungnya karena Partai Ba'ath tetap menjadi partai terbesar di Suriah, meskipun hal itu dilakukan tanpa cara yang demokratis. Bahkan di antara mereka mendapatkan jatah di kabinet. Kalangan pebisnis yang sebagian besar adalah warga Muslim, mendapatkan keuntungan yang besar, selama dekat dengan pengurus partai. Sedangkan warga minoritas, terutama warga Allawiyah mendapatkan jatah di dinas intelijen dan angkatan bersenjata. Ini membuat al-Assad aman dari kudeta militer. Di sisi lain kelompok oposisi secara sistematis ditekan oleh al-Assad melalui angkatan bersenjata, dinas intelijen, serta anggota mukhabarat yang tidak segan-segan melakukan tindakan brutal terhadap kelompok oposisi. Hal ini yang membuat Hafiz al-Assad dapat mempertahankan kekuasaannya sampai wafatnya di tahun 2000.

## BAB 6. PENUTUP

### 6.1 Simpulan

Berdasarkan penjabaran penelitian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagaimana berikut;

Sejak Perang Enam Hari 1967, terdapat sejumlah rencana perdamaian, tetapi belum satu pun terlaksana, hingga akhirnya digagaslah perjanjian Camp David dengan Amerika Serikat sebagai mediatornya. Sejak awal perjanjian Camp David sudah banyak ditentang oleh negara-negara Arab maupun masyarakat Mesir sendiri. Perjanjian Camp David tetap dipilih oleh Anwar Sadat agar dapat sesegera mungkin mendapatkan kembali wilayah semenanjung Sinai dan mengatasi masalah krisis ekonomi yang melanda Mesir.

Dampak perjanjian Camp David tidak hanya dirasakan Mesir namun juga dirasakan seluruh anggota Liga Arab. Bagi Negara-negara Arab, perjanjian Camp David telah berhasil memecah belah persatuan negara-negara Arab. Berpindahnya Mesir ke sisi Israel dan Amerika telah membuat negara-negara Arab kehilangan penyeimbang kekuatan untuk melawan Israel. Dunia Arab menyadari bahwa mendekatnya Mesir kesisi Amerika Serikat dan Israel membuat semakin kuat posisi Israel diwilayah Palestina. Sejalan dengan disahkannya perjanjian Camp David maka penyelesaian masalah Palestina semakin menuai ketidakpastian.

Bagi Mesir dampak dari terlaksananya perjanjian Camp David dirasakan dengan berubahnya sikap negara-negara Arab yang menjauhi Mesir. Mesir juga dikeluarkan dari keanggotaan Liga Arab serta markas pusat Liga Arab dipindahkan dari Kairo ke Tunis. Berbagai sumber bantuan dari negara-negara Arab dihentikan dan Mesir menjadi terkucil dari dunia Arab. Mesir juga dituduh telah melakukan perjanjian perdamaian tersendiri (*separate peace*) yang bertentangan dengan kesepakatan antar negara-negara Arab. tuduhan yang berat juga berkenaan dengan masalah Palestina yang dianggap tidak diperhatikan sebagaimana mestinya dalam naskah perjanjian Camp David.

Setelah terlaksananya perjanjian Camp David, kondisi sosial dan ekonomi dalam negeri Mesir tidak kunjung membaik, malah semakin memburuk.

Kelompok-kelompok radikal mulai bermunculan dikarenakan kekecewaan masyarakat Mesir atas keputusan yang diambil Anwar Sadat. Kondisi masyarakat Mesir yang semakin tidak bisa dikendalikan dan untuk mencegah berkembangnya kelompok radikal maka Anwar Sadat terpaksa menempuh jalan kekerasan dengan penangkapan besar-besaran terhadap gerakan yang menentang pemerintah.

Terlaksananya perjanjian Camp David telah merubah peta geopolitik di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel telah berhasil mendapatkan Mesir sebagai sekutu. Keinginan Amerika Serikat untuk merebut pengaruh di Timur Tengah yang selama ini dikuasai Uni Soviet telah berhasil dilakukan. Letak geografis yang sangat strategis dan sumber daya alam berupa minyak mentah adalah dua hal yang selama ini diincar oleh Amerika Serikat.

Perjanjian Camp David menyebabkan dampak domino yang hingga saat ini dapat kita rasakan. Kebijakan-kebijakan politik Luar Negeri Mesir yang masih berpihak terhadap kepentingan Amerika Serikat dan Israel, meskipun Mesir sudah beberapa kali mengalami pergantian presiden sejak meninggalnya presiden Anwar Sadat namun Mesir masih belum lepas dari pengaruh Amerika Serikat.

## 6.2 Saran

Ada beberapa saran yang akan penulis berikan kepada para pembaca, di antaranya :

- 1) Kepada para Mahasiswa calon guru sejarah, Penelitian ini diharapkan dapat mengasah dan memahami secara mendalam mengenai Perjanjian Camp David dan Dampaknya bagi Mesir dan Negara-Negara Arab pada masa Pemerintahan Anwar Sadat.
- 2) Kepada almamater, hendaknya memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengadakan penelitian, terutama yang berada di wilayah sendiri, sehingga akan membawa dampak terhadap rasa cinta tanah air, bangsa dan negara.
- 3) Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Perjanjian Camp David dan Dampaknya bagi Mesir dan Negara-Negara Arab pada masa Pemerintahan Anwar Sadat, dan

dapat mengambil nilai-nilai tauladan dan rasa nasionalisme yang dicontohkan dari para pejuang kemerdekaan wilayah Palestina, Mesir dan Negara-Negara Arab, baik dalam hal politik, hambatan, perjuangan, dan kepemimpinannya.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- Abdurrahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Amstrong, K. 2004. *Perang Suci: dari Perang Salib Hingga Perang Teluk*. Jakarta: Serambi.
- Budiardjo, M. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia
- Chossudovsky, M. 2014. *Skenario Perang Dunia III*, Jakarta: Zaituna Ufuk Malik.
- Desmon A, A. 2007. *Ensiklopedi Peradaban dunia: Sebuah Ensiklopedi Praktis nan Lengkap 4000 peristiwa penting 900 tokoh dunia dan ratusan artikel menarik*. Jakarta: Restu Agung.
- ED. James dan Robert, 1986, *Beberapa Teori Hubungan Internasional*, terjemahan Amien Rais, Yogyakarta: UGM.
- Eposito J. L, dan O. Voll. 1999. *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*. Terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan.
- Findley, P. 1995. *Diplomasi Munafik Ala Yahudi: Mengungkap Fakta Hubngan AS-Israel*. Jakarta : Mizan.
- Frangkel. 1991. *Hubungan Internasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gottschalk, L. 1983. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan: Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Haekal, M. 1995. *Anwar Sadat: Kemaru Kemarahan*. Jakarta: Pustaka Grafitipers.
- Houranni, A. 2004. *Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim*. Terj. Irfan Abu Bakar. Bandung: Mizan.
- Huntington, S. P. 2001. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Qolam.
- Hunter, S.T. 2001. *Politik Kebangkitan Islam*. Terj. Ajat S.U. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogni.
- Husein. dkk. 1995. *Prospek Perdamaian di Timur Tengah: Sebuah Tilikan Latar Belakang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Jackson, R & Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuncahyono, T. 2009. *Jalur Gaza: Tanah Terjanji, Intifada, dan Pembersihan Etnis*. Jakarta: Kompas.
- Lenczowski, G. 1992. *Timur Tengah di Kancah Dunia*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Misrawi. Z. 2010. *Al- Azhar: Menara Ilmu, Reformasi dan Kiblat Keulamaan*. Jakarta: Kompas.
- Rahmat, M. I. 2007. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, M. 2002. *Jejak – Jejak Juang Palestina..* Jakarta: Kompas.
- Rais, M. A. 1986. *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Rais, M. A. 1989. *Politik Internasional Dewasa ini*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sadat, A. 1983. *Mencari Identitas sebuah Autobiografi*, Terj. Drs. Banu Iskandar, Marwan, dan Dra. Lanny Anggawati. Jakarta; Tiara Pustaka.
- Saikal, A. 2006. *Islam dan Barat, Konflik atau Kerjasama*. Jakarta: Sanabil.
- Sihbudi, R, dkk. 1995. *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Sihbudi, R. 1993. *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*. Bandung: Eresco.
- Sihbudi, R. 2007. *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta: Mizan Publika.
- Sihbudi, R. 1991. *Islam, Dunia Arab, Iran: Bara Timur Tengah*. Bandung: Mizan.
- Sihbudi, R. 1979. *World Reaction: Camp David Could Lead to World War III*. Executive Intelligence Review, Volume 6, number 13.

**Internet :**

- Hikmah Arif, 2009, *Tentang Pengertian Dampak Menurut Para Ahli*, <http://ariefhikmah.com/search/pengertian-dampak-menurut-para-ahli> ( 25 Februari 2019 )
- Waralah C, 2008. *Pengertian Dampak*, <http://www.artikata.com/arti-324325-dampak.html> ( 25 Februari 2019)